



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No. 21 Padang Harapan Telp. (0736) 22231 fax. (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id Email : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Bengkulu

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2019 dengan tepat waktu. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2019 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tahun 2019. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diwilayah Provinsi Bengkulu. Selain itu, laporan ini dilaksanakan untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Prestasi yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang sesuai dengan Motto Pengadilan Tinggi Bengkulu : "**CERDAS**", yakni: Cermat, Enyahkan KKN, Responsif, Disiplin, Adil dan Sejahtera".

Penyusunan laporan ini sudah barang tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang memerlukan saran dan masukan guna perbaikan di masa datang, untuk itu sangatlah berguna bagi kami sumbangan pemikiran yang bersifat membangun dan bernilai positif demi kemajuan Pengadilan Tinggi Bengkulu khususnya, dan warga Peradilan Umum seluruh Indonesia pada umumnya serta semua lingkungan peradilan yang ada di bawah binaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bengkulu, 17 Januari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

DR. MOH. EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.
NIP. 195811101984031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II.....	10
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI BENGKULU	10
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	12
JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS	12
JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	13
JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK.....	14
JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI	15
JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI	16
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)	16
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	18
A. SUMBER DAYA MANUSIA.....	18
MUTASI	30
PROMOSI.....	31
PENSIUN.....	32
DIKLAT	32
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	33
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	33
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	34
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	57
IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU	58
IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU	59
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	61
AKREDITASI PENJAMIN MUTU	61
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	62
INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	65
BAB VI PENGAWASAN.....	69
A. INTERNAL.....	69
B. EVALUASI	77
BAB VII PENUTUP	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. REKOMENDASI	79

BAB I

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman tersebut selain dilakukan oleh Mahkamah Agung, juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan Pengadilan Negara tertinggi yang terdiri dari empat lingkungan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Sesuai dengan Pasal 20 ayat 2, Pasal 22 angka 1, Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sesuai Pasal 28 angka 1, Pasal 31 dan 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan dibawah Undang-Undang, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Pemerintah, mengadili perkara peninjauan kembali serta memutus sengketa tentang wewenang mengadili. Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung banyak melibatkan peran pada peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap empat Badan Peradilan dibawahnya.

Sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan terkait teknis peradilan dari empat Badan Peradilan dibawahnya dan menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku Hakim, sehingga pengawasan Mahkamah Agung RI meliputi pelaksanaan tugas yudikatif, administrasi keuangan, dan berwenang memberi petunjuk, teguran, peringatan kepada semua lingkungan peradilan dibawahnya.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut dalam cetak biru telah ditetapkan Visi Mahkamah Agung , yakni “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dengan empat Misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam rangka merealisasi program tersebut, Mahkamah Agung RI telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan bentuk-bentuk peraturan Mahkamah Agung RI yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan berbagai peraturan pelaksanaan yang lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung maupun Peraturan Direktur Jendral Badilum, Surat Keputusan Direktur Jendral Badilum dan Surat Edaran Direktur Jendral Badilum yang semuanya demi terwujudnya arah, sasaran dan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai institusi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sesuai Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding dan tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah nya apabila diminta. Pengadilan Tinggi Bengkulu juga berfungsi sebagai kawal depan (Vooport) Mahkamah Agung. Sesuai Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Ketua Pengadilan Tinggi selain mempunyai tugas pengawasan terhadap tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, juga bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut Ketua Pengadilan Tinggi dapat memberikan petunjuk, teguran dan peringatan tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kawal depan diharapkan dapat mendukung tugas dan fungsi serta program Mahkamah Agung RI, sehingga Pengadilan Tinggi Bengkulu selain tugas dan fungsinya sebagai peradilan tingkat banding, juga menjalankan pengawasan terhadap jalan nya Pengadilan Negeri diwilayahnya sebagai kewenangan delegasi Mahkamah Agung RI.

Sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lain dilingkungannya, bahwa Ketua Pengadilan Tinggi bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Pengadilan Tinggi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai peradilan banding, juga harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peradilan umum dibawahnya yaitu pada 9 Pengadilan Negeri yang meliputi : Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei, Pengadilan Negeri Argamakmur, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Manna, Pengadilan Negeri Bintuhan dan Pengadilan Negeri Mukomuko.

Tugas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut menyangkut penyelesaian perkara oleh Hakim, Panitera dan Juru Sita dalam administrasi perkara dan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan oleh Sekretaris di tingkat Pengadilan Negeri, dimana pengawasan dan pembinaan rutin terhadap jalannya peradilan negeri tersebut. Untuk menjalankan tugas tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah serta dengan dilaksanakannya program penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) terhadap Pengadilan Negeri dilingkungan peradilan umum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Bengkulu berusaha keras untuk meningkatkan produktifitas kinerjanya dengan hasil dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga pelayanan yang prima sebagai sasaran strategisnya harus ditingkatkan untuk mencapai Visi agar terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung.

Demi terwujudnya peradilan yang unggul (*excellent*) tentu diperlukan tata kelola manajemen yang menyangkut organisasi perundang-undangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengawasan dan seterusnya sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana dengan biaya ringan dapat tercapai.

Asas-asas tersebut telah ditunjang dengan keluarnya berbagai Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Surat Keputusan maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang diantaranya tentang ketentuan teknis penyelesaian perkara maupun tentang organisasi, administrasi umum, keuangan, disiplin kerja yang diatur pada kode etik perilaku pejabat teknis fungsional dan pedoman perilaku aparat pengadilan serta ketentuan yang menyangkut peningkatan pelayanan akses peradilan pada masyarakat tidak mampu dengan adanya Posbakum maupun yang berkaitan dengan transparansi peradilan dalam penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan serta transparansi dalam pembebanan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara, penerapan penyelesaian perkara dengan teknologi informasi, percepatan panggilan dan pemberitahuan dengan delegasi, ketentuan

penerimaan tamu, fasilitas defabel dan penerapan manajemen resiko dan sebagainya adalah berkaitan dengan pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI pada cetak biru pembangunan jangka panjang pembaruan Badan Peradilan yang dimulai sejak tahun 2010-2035, dan untuk dapat mengetahui tentang hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi pokok dan tugas pengawasan terhadap jalannya peradilan umum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu sangat perlu untuk diketahui kebijakan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI melalui peraturan dan ketetapanannya yang dikeluarkan sejak tahun 2010 hingga saat ini yang berhubungan dengan arah kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada bidang-bidang sebagai berikut :

1. **Fungsi Peradilan**, diantaranya dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang pelaksanaannya selanjutnya keluar petunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK/006/5/2014; SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat/Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan.
2. **Manajemen Perkara**, diantaranya dengan keluarnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan keberatan dan penetapan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan waktu penyelesaian perkara, SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan pemanggilan dan pemberitahuan, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Keputusan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan taping dan jumlah denda dalam KUHP meredefinisikan ulang nilai kerugian (Pasal 364, 373, 384, 407, 482 KUHP), PERMA Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. **Manajemen Sumber Daya Manusia**, diantaranya dengan keluarnya Peraturan SEKMA Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monev SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Surat Keputusan KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada empat lingkungan peradilan, SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar pelayanan peradilan, PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. **Manajemen Sumber Daya Keuangan**, yaitu dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 10/Sek/SK/III/2017 tentang Pedoman penyelenggaraan pendapatan dan Belanja Negara di kepaniteraan Mahkamah Agung, peradilan tingkat pertama dan banding, SEMA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan pertanggungjawaban biaya transportasi bagi Aparatur Negara yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SK KMA Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
5. **Manajemen Sarana dan Prasarana**, yaitu dengan dikeluarkannya SK Dirjen Badilum Nomor 1586/DJu/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat pencari keadilan.
6. **Manajemen Informasi Teknologi**, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Aplikasi SIPP Di Lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum dan SOP SIPP, SK Dirjen Badilum Nomor 3/DJU/HM0/23/6/2016 tentang Administrasi pengadilan berbasis teknologi informasi di lingkungan peradilan umum, SK Dirjen Badilum Nomor 1001/DJU/SK/HM023/6/2016 tentang Pembentukan satgas aplikasi SIPP di lingkungan peradilan umum, SK Dirjen Badilum Nomor 136/DJU/HM0 23/3/2016 tentang Pembentukan kelompok kerja aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran MARI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali.
7. **Transparansi Peradilan**, yaitu dengan keluarnya SK Dirjen Badilum Nomor 1586/2015 tentang Standarisasi pelayanan pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari keadilan, SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di pengadilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SEMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA, SEMA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan tamu, SK SEKMA Nomor 268/Sek/01/V/2010 tentang Pengembalian sisa panjar perkara, SK Dirjen Badilum 362/DJU/HMO 23/IV/2015 tentang Standar Website.

- 8. Fungsi Pengawasan**, yaitu dengan dikeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SK Dirjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal, SK SEKMA Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Peraturan SEKMA Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Kinerja dilingkungan Mahkamah Agung.

Pengadilan Tinggi Bengkulu dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 15 tahun 1982, dan Gedungnya mulai dibangun pada tanggal 18 Nopember 1981 dan selesai pembangunannya pada tanggal 15 April 1983. Peresmianya sendiri dilakukan pada tanggal 20 Desember 1982 oleh Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yang mewakili Menteri Kehakiman pada saat itu, Bapak Ali Said, S.H.

Gedung Pengadilan Tinggi Bengkulu terletak di Jalan Pembangunan Nomor 21 Padang Harapan Bengkulu dibangun diatas tanah seluas 8.958 m² dengan luas bangunan seluruhnya 1900 m², terdiri dari lantai bawah seluas 950 m² dan lantai atas seluas 950 m².

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di

daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986), dikecualikan dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan Tinggi juga disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat 2 UU RI Nomor 2 Tahun 1986).

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI



Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu Lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (*Voorpost*), di wilayah hukumnya membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri, yaitu:

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI	DAERAH HUKUM / WILAYAH KERJA	KELAS
1.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelas 1A
2.	PENGADILAN NEGERI CURUP	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	Kelas 1B
3.	PENGADILAN NEGERI MANNA	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kelas II
4.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	Argamakmur	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah	Kelas II
5.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Bintuhan	Kabupaten Kaur	Kelas II
6.	PENGADILAN NEGERI TAIS	Tais	Kabupaten Seluma	Kelas II
7.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	Tubei	Kabupaten Lebong	Kelas II

8.	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang	Kelas II
9.	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Mukomuko	Kabupaten Mukomuko	Kelas II

Meskipun Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka, tetapi tidak menutup kerja sama atau koordinasi antar Pengadilan. Dinyatakan, untuk kepentingan Peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta. Berikut tugas Pokok dan Fungsi dari Pengadilan Tinggi Bengkulu :

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan Tanggung Jawabnya Pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu wajib memiliki kemampuan mengelola (*Managerial Skill*), yang meliputi pembuatan Rencana Kerja (*Planning*), mengatur Pelaksanaannya (*Organizing*), menggerakkan (*Actuating*) dan Mengawasi Pelaksanaannya (*Controlling*) yaitu :
 - Pengadilan Tinggi Bengkulu wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi Perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
 - Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
 - Sesuai dengan sifat Pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.
 - Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari Pimpinan Unit Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.
 - Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Muda

Khusus, dan Panitera Pengganti, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
4. Membagi dan menetapkan tugas dan Tanggung Jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama Pejabat/Petugas yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan seluruh karyawan.
7. Membuat/menyusun Legal Data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
10. Melakukan pengawasan Internal dan External :
 - Internal : pejabat peradilan, keuangan dan material
 - External : pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi Unit Hukum tertentu.
12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
14. Mengawasi pelaksanaan *Court Calender* dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 3 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
16. Melakukan pembinaan terhadap Organisasi DHARMA YUKTI KARINI, IKAHI, IPASPI.
17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA

Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara tahun 2018	Perkara Masuk 2019	Perkara Putus Tahun 2019	Sisa Perkara tahun 2019	*Keterangan
I. Pengadilan Tinggi Bengkulu						
1.	Pidana	11	117	118	10	
2.	Pidana Khusus/Tipikor	-	11	8	3	
3.	Perdata	9	35	41	3	
II. Pengadilan Negeri Bengkulu						
1.	Perdata Gugatan	27	62	68	21	
2.	Perdata Permohonan	10	360	368	2	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-	14	13	1	
4.	PHI	16	19	30	5	
5.	Pidana Umum	128	618	695	51	
6.	Pidana Singkat	-	-	-	-	
7.	Pidana Praperadilan	1	5	6	-	
8.	Pidana Cepat	2	50	52	-	
9.	Pidana Anak	3	73	74	2	
10.	Lalu Lintas	-	14.984	14.984	-	
III. Pengadilan Negeri Curup						
1.	Perdata Gugatan	7	6	11	2	
2.	Perdata Permohonan	1	65	65	1	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-	3	3	-	
4.	Pidana Umum	38	205	231	12	
5.	Pidana Singkat	-	-	-	-	
6.	Pidana Praperadilan	-	1	1	-	
7.	Pidana Cepat	-	3	3	-	
8.	Pidana Anak	2	9	11	-	
9.	Lalu Lintas	-	4.931	4.931	-	
IV. Pengadilan Negeri Manna						
1.	Perdata Gugatan	2	8	6	4	
2.	Perdata Permohonan	2	52	53	1	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1	23	23	1	
4.	Pidana Umum	10	138	134	14	

5.	Pidana Singkat	-	-	-	-	
6.	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	
7.	Pidana Cepat	-	8	8	-	
8.	Pidana Anak	1	27	28	-	
9.	Lalu Lintas	-	4.449	4.449	-	
V.	Pengadilan Negeri Argamakmur					
1.	Perdata Gugatan	6	13	10	9	
2.	Perdata Permohonan	-	42	41	1	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-	4	4	-	
4.	Pidana Umum	19	181	154	46	
5.	Pidana Singkat	-	-	-	-	
6.	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	
8.	Pidana Anak	-	23	22	1	
9.	Lalu Lintas	-	2.473	2.473	-	
VI.	Pengadilan Negeri Bintuhan					
1.	Perdata Gugatan	-	2	1	1	
2.	Perdata Permohonan	-	59	59	-	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	
4.	Pidana Umum	12	83	93	2	
5.	Pidana Singkat	-	-	-	-	
6.	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	
8.	Pidana Anak	-	14	14	-	
9.	Lalu Lintas	-	1.188	1.188	-	
VII.	Pengadilan Negeri Tais					
1.	Perdata Gugatan	5	3	8	-	
2.	Perdata Permohonan	-	1	1	-	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-	7	7	-	
4.	Pidana Umum	16	116	117	15	
5.	Pidana Singkat	-	-	-	-	
6.	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	
7.	Pidana Ringan	-	61	61	-	
8.	Pidana Anak	-	9	9	-	
9.	Lalu Lintas	-	2.856	2.856	-	
VIII.	Pengadilan Negeri Kepahiang					
1.	Perdata Gugatan	-	5	4	1	
2.	Perdata Permohonan	1	50	51	-	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-	2	2	-	

4.	Pidana Umum	26	144	140	30	
5.	Pidana Singkat	-	-	-	-	
6.	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	
7.	Pidana Cepat	-	1	1	-	
8.	Pidana Anak	1	9	10	-	
9.	Lalu Lintas	-	2.055	2.055	-	
IX. Pengadilan Negeri Tubei						
1.	Perdata Gugatan	1	1	-	1	
2.	Perdata Permohonan	-	28	28	-	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	
4.	Pidana Umum	9	85	87	7	
5.	Pidana Singkat	-	1	1	-	
6.	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	
7.	Pidana Cepat	-	5	5	-	
8.	Pidana Anak	-	13	13	-	
9.	Lalu Lintas	-	1.179	1.179	-	
X. Pengadilan Negeri Mukomuko						
1.	Perdata Gugatan	2	5	7	-	
2.	Perdata Permohonan	1	61	62	-	
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-	49	49	-	
4.	Pidana Umum	6	80	82	4	
5.	Pidana Singkat	-	-	-	-	
6.	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	
7.	Pidana Cepat	-	3	3	-	
8.	Pidana Anak	-	2	2	-	
9.	Lalu Lintas	-	2.035	2.035	-	

B. PENYELESAIAN PERKARA

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Jumlah sisa perkara tahun 2018 yang diputus pada tahun 2019 pada Pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

NO	SATKER	JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS					
		PIDANA		PERDATA		PHI/TIPIKOR	
		Sisa Perkara tahun 2018	Diputus tahun 2019	Sisa Perkara tahun 2018	Diputus tahun 2019	Sisa Perkara tahun 2018	Diputus tahun 2019
1	Pengadilan Tinggi Bengkulu	11	11	9	9	-	-

2	Pengadilan Negeri Bengkulu	134	134	38	38	47	47
3	Pengadilan Negeri Curup	40	40	8	8	-	-
4	Pengadilan Negeri Manna	11	11	5	5	-	-
5	Pengadilan Negeri Argamakmur	19	19	6	6	-	-
6	Pengadilan Negeri Bintuhan	12	12	-	-	-	-
7	Pengadilan Negeri Tais	16	16	5	5	-	-
8	Pengadilan Negeri Kepahlang	27	27	1	1	-	-
9	Pengadilan Negeri Tubei	9	9	-	-	-	-
10	Pengadilan Negeri Mukomuko	6	6	3	3	-	-

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU (3 bulan di Pengadilan Tinggi dan 5 Bulan di Pengadilan Negeri)

No	PERKARA	PERKARA YANG DITANGANI		PERKARA YANG DIPUTUS	PENYELESAIA N PERKARA TEPAT WAKTU	PENYELESAIA N PERKARA LEBIH DARI WAKTU
		SISA 2018	MASUK 2019			
I.	Pengadilan Tinggi Bengkulu					
1.	Pidana	11	117	118	118	-
2.	Pidana Khusus/Tipikor	-	11	8	8	-
3.	Perdata	9	35	41	41	-
II.	Pengadilan Negeri Bengkulu					
1.	Pidana	134	746	827	824	3
2.	Pidana Khusus/Tipikor	54	31	79	76	3
3.	Perdata	38	437	450	419	31
4.	PHI	16	19	30	30	-
III.	Pengadilan Negeri Curup					
1.	Pidana	40	218	246	246	-
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	8	74	79	79	-
IV.	Pengadilan Negeri Manna					
1.	Pidana	11	173	170	170	-
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	5	83	83	83	-
V.	Pengadilan Negeri Argamakmur					
1.	Pidana	19	204	173	173	-
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	6	59	54	49	5
VI.	Pengadilan Negeri Bintuhan					
1.	Pidana	12	97	107	107	-

2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	-	61	60	60	-
VII. Pengadilan Negeri Tals						
1.	Pidana	16	186	187	186	1
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	5	11	16	16	-
VIII. Pengadilan Negeri Kepahiang						
1.	Pidana	27	154	151	151	-
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	1	57	57	57	-
IX. Pengadilan Negeri Tubei						
1.	Pidana	9	104	106	106	-
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	-	29	28	28	-
X. Pengadilan Negeri Mukomuko						
1.	Pidana	6	85	87	87	-
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	3	115	118	118	-

JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

No	PERKARA	PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2019	PERKARA BANDING	PERKARA KASASI	PERKARA PK	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
I. Pengadilan Negeri Bengkulu						
1.	Pidana	799	67	10	-	698
2.	Pidana Khusus/Tipikor	74	9	6	2	57
3.	Perdata	443	17	10	-	416
II. Pengadilan Negeri Curup						
1.	Pidana	246	9	7	-	230
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	79	4	3	-	72
III. Pengadilan Negeri Manna						
1.	Pidana	170	5	1	-	164
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	83	1	1	-	81
IV. Pengadilan Negeri Argamakmur						
1.	Pidana	173	10	3	-	160

2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	54	5	2	1	46
V.	Pengadilan Negeri Bintuhan					
1.	Pidana	95	1	2	-	92
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	60	1	-	-	59
VI.	Pengadilan Negeri Tais					
1.	Pidana	187	15	10	-	162
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	16	1	1	-	14
VII.	Pengadilan Negeri Kepahiang					
1.	Pidana	151	8	2	-	141
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	57	1	-	-	56
VIII.	Pengadilan Negeri Tubei					
1.	Pidana	106	-	3	-	103
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	28	-	3	-	25
IX.	Pengadilan Negeri Mukomuko					
1.	Pidana	87	1	-	-	86
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-
3.	Perdata	118	1	-	-	117

JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DILAKUKAN MEDIASI	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI	PERSENTASE (%)
1	Pengadilan Negeri Bengkulu	89	3	3,37
2	Pengadilan Negeri Curup	13	2	15,38
3	Pengadilan Negeri Manna	10	1	10
4	Pengadilan Negeri Argamakmur	19	-	0
5	Pengadilan Negeri Bintuhan	1	-	0
6	Pengadilan Negeri Tais	8	2	25
7	Pengadilan Negeri Kepahiang	5	-	0
8	Pengadilan Negeri Tubei	1	-	0
9	Pengadilan Negeri Mukomuko	7	-	0

JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA ANAK YANG DITANGANI	PERKARA ANAK DENGAN ANCAMAN PIDANA KURANG 7 TAHUN	JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI	PERSENTASE (%)
1	Pengadilan Negeri Bengkulu	74	0	0	0
2	Pengadilan Negeri Curup	17	0	0	0
3	Pengadilan Negeri Manna	27	0	0	0
4	Pengadilan Negeri Argamakmur	19	0	0	0
5	Pengadilan Negeri Bintuhan	14	1	1	100
6	Pengadilan Negeri Tais	9	0	0	0
7	Pengadilan Negeri Kepahiang	9	0	0	0
8	Pengadilan Negeri Tubei	13	6	0	0
9	Pengadilan Negeri Mukomuko	2	0	0	0

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)**POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)**

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mendapat alokasi anggaran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2019 ini. Anggaran ini digunakan untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis. Dengan Posbakum diharapkan adanya peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Berikut data PAGU dan Realisasi Anggaran POSBAKUM

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	JUMLAH LAYANAN	PELAKSANA POSBAKUM
1.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	Rp.48.000.000,-	Rp.48.000.000,-	480,00 Jam Layanan	LKBH UMB
2.	PENGADILAN NEGERI CURUP	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	240,00 Jam Layanan	1. LBH BAKTI ALUMNI UNIB 2. LBH REJANG LEBONG
3.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	240,00 Jam Layanan (Total Pengunjung 168)	LBH - Wawan Adil
4.	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	240,00 Jam Layanan	LKBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup
5.	PENGADILAN NEGERI MANNA	Rp.24.000.000,-	Rp.23.700.000,-	237,00 Jam	LBH bakti alumni

				Layanan	unib Cabang Bengkulu Selatan
6.	PENGADILAN NEGERI TAIS	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	240,00 Jam Layanan	LKBH UMB Bengkulu
7.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	240,00 Jam Layanan	LBH UMB Bengkulu
8.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	240,00 Jam Layanan	Deski Bewartara, SH., MH. Dan Rekan
9.	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	240,00 Jam Layanan	Heriyanto Siahaan, S.H & Rekan

SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak melaksanakan Sidang Keliling dikarenakan letak Pengadilan dapat dijangkau oleh seluruh pencari keadilan diwilayah Hukum Pengadilan dan tidak ada anggaran untuk melayani proses pelaksanaan sidang keliling.

PERKARA PRODEO

Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan Alokasi Pembebasan Biaya Perkara pada DIPA 03 Tahun Anggaran 2019. Namun alokasi anggaran yang tersedia belum bisa terealisasi maksimal, bahkan pada beberapa Pengadilan Tingkat Pertama realisasi anggaran masih nihil, dikarenakan tidak ada nya para masyarakat para pencari keadilan yang mengajukan Perkara Dengan Menggunakan Pembebasan Biaya Perkara.

NO	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	JUMLAH PERKARA PRODEO YG DISELESAIKAN
1.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	Rp.1.840.000	Rp.0	Rp. 1.840.000	-
2.	PENGADILAN NEGERI CURUP	Rp.0	Rp.0	Rp.0	-
3.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	Rp. 0	Rp.0	Rp.0	-
4.	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	Rp. 1.650.000	Rp. 1.404.000	Rp. 246.000	9
5.	PENGADILAN NEGERI MANNA	Rp.0	Rp.0	Rp.0	-
6.	PENGADILAN NEGERI TAIS	Rp.0	Rp.0	Rp.0	-
7.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Rp.0	Rp.0	Rp.0	-
8.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	Rp. 0	Rp.0	Rp. 0	-
9.	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Rp. 0	Rp.0	Rp.0	-

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut adalah matrik Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dr. Moh Eka Kartika EM, SH., M.Hum	195811101984031005	10 - 11 - 1958	Ketua Pengadilan	IV/e	DOKTOR	L
2	Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H	195904101985121001	10 - 04 - 1959	Wakil Ketua Pengadilan	IV/e	DOKTOR	L
3	Nursiah Sianipar, S.H., M.H.	196012191985122001	19 - 12 - 1960	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	P
4	Ratna Mintarsih, SH, MH	195901251985032003	25 - 01 - 1959	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	P
5	Iman Gultom, SH. MH	196003021985121001	02 03 - 1960	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	L
6	Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.	196006241985121001	24 - 06 - 1960	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	L
7	M. Jalili Sairin, S.H.,M.H	196001291986011001	29 - 01 - 1960	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	L
8	Marlianis, S.H.,M.H.	196005271985122001	27 - 05 - 1960	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	P
9	Tursinah Aftianti, SH, MH	196002171985122001	17 - 02 - 1960	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	P
10	Poltak Manahan Silalahi, SH, MH	195802271985121001	27 - 02 - 1958	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	L
11	Sukmayanti, S.H.,M.H.	196104171985122001	17 - 04 - 1961	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	P
12	Eni Indriyartini, SH.MH	195904131986122001	13 - 04 - 1959	Hakim Tinggi	IV/e	PASCASARJANA	P
13	Winarto, S.H.	196003251986121001	25 - 03 - 1960	Hakim Tinggi	IV/d	STRATA I	L
14	Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum	196201141986122001	14 - 01 - 1962	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	P
15	Ida Marion, SH, MH	195904151986122001	15 - 04 - 1959	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	P
16	Tety Siti Rochmat Setyawati,S.H, M.H.	196007061986122001	06 - 07 - 1960	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	P
17	Loise Betti Silitonga, SH.MH	196006101987032001	10 - 06 - 1960	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	P
18	Wiwik Suhartono, S.H., M.H.	196106191986121001	19 - 06 - 1961	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	L
19	Arini, S.H.	196010291986122001	29 - 10 - 1960	Hakim Tinggi	IV/d	STRATA I	P
20	Marulak Purba, S.H., M.H.	196208131986121001	13 - 08 - 1962	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	L
21	Lidya Sasando Parapat, S.H., M.H.	195911221986122001	22 - 11 - 1959	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	P
22	Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.	196012201986121002	20 - 12 - 1960	Hakim Tinggi	IV/d	DOKTOR	L

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

23	Achmad Dimiyati Rachmad Sulur, SH.MH	195811101988031002	10 - 11 - 1958	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	L
24	Lince Anna Purba, S.H.,M.H.	195809061988032001	06 - 09 - 1958	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	P
25	A. Dachrowi Sa, SH, MH	195404051988031001	05 - 04 - 1954	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	L
26	Emilia Djajasubagia, SH., MH	196010071988032002	07 - 10 - 1960	Hakim Tinggi	IV/d	PASCASARJANA	P
27	Anggiat, SH., M.Hum	195903011992121001	01 - 03 - 1959	Hakim Non Palu	IV/c	PASCASARJANA	L
28	Crimson, SH	198410182009041004	18 - 10 - 1984	Hakim Non Palu	III/c	STRATA I	L
29	Tavip Dwiymiko, SH, MH	196411101987021001	10 - 11 - 1964	Panitera Tingkat Banding	IV/c	PASCASARJANA	L
30	Zailani Syahib, S.H	195903141986031019	14 - 03 - 1959	Panitera Pengganti	IV/b	STRATA I	L
31	Endri Novian, S.E	197511092003121001	09 - 11 - 1975	Sekretaris	IV/a	STRATA I	L
32	Kamal Abdul Naser, S.H.	196008291982031007	29 - 08 - 1960	Panitera Pengganti	IV/a	STRATA I	L
33	Fahrudin, S.H.	196206251990031002	25 - 06 - 1962	Panitera Pengganti	IV/a	STRATA I	L
34	Yurni Hendarwati, S.Pd	197010121992032001	12 - 10 - 1970	Kepala Bagian Kepagawain dan Perencanaan	IV/a	STRATA I	P
35	Umi Kalsum, S. Sos	196807281990032003	28 - 07 - 1968	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	IV/a	STRATA I	P
36	Rizwan Manadi, SH	196301211992031010	21 - 01 - 1963	Panitera Muda Perdata	IV/a	STRATA I	L
37	Palan Simanungkalit, S.H.	195711031979031004	03 - 11 - 1957	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
38	Jamaludin, SH	196012121985031009	12 - 12 - 1960	Panitera Muda Pidana	III/d	STRATA I	L
39	Turijan, SH	196309181985031004	18 - 09 - 1963	Panitera Muda Hukum	III/d	STRATA I	L
40	Susyanti, SH	196102281983032004	28 - 02 - 1961	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	P
41	Suwandi, SH	196102121982031004	12 - 02 - 1961	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
42	Supran, S.H.	196311201985031005	20 - 11 - 1963	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
43	Kardini, SH	196703191990031001	19 - 03 - 1967	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
44	Hasahatan Sormin, S.H.	195811071985031002	07 - 11 - 1958	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
45	Pungut, SH	196109301983111001	30 - 09 - 1961	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
46	Zekma, SH	196409141985032004	14 - 09 - 1964	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	P
47	Alidin, SH	196309031985021001	03 - 09 - 1963	Panitera Muda Khusus	III/d	STRATA I	L
48	Suarsih, SH.	196208021985022002	02 - 08 - 1962	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	P
49	Firman, S.H.	195804051988031002	05 - 04 - 1958	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
50	Fatmawati, SH	196707081989032011	08 - 07 - 1967	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	P
51	Harneti, SH	196103251986032001	25 - 03 - 1961	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	P
52	Garini Martati, S.H.	196703101987032001	10 - 03 - 1967	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	P
53	Darno, SH	196402021983031001	02 - 02 - 1964	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
54	Nazori, SH	196910091989031002	09 - 10 - 1969	Panitera Pengganti	III/d	STRATA I	L
55	M Ali El Fahmi, ST	197506292005021001	29 - 06 - 1975	Kepala Sub Bagian Kepagawain dan TI	III/d	STRATA I	L

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

56	Rina Astuti, SE	197308302006042015	30 - 08 - 1973	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	III/d	STRATA I	P
57	Tini Elorasita, BPA	196506151990032001	15 - 06 - 1965	Pengadministrasi Umum	III/c	DIPLOMA III	P
58	Fidiyah Sistona, S.E.	198203312009042001	31 - 03 - 1982	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	III/c	STRATA I	P
59	Linda Nora, S. Kom. SH	197706102009042004	10 - 06 - 1977	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	III/c	STRATA I	P
60	Yoki Septiawan, SH	197909302009041004	30 - 09 - 1979	Pengadministrasi Umum	III/c	STRATA I	L
61	Yuda Agusta, SH, MH	198608162011011010	16 - 08 - 1986	Pengadministrasi Umum	III/c	PASCASARJANA	L
62	Friesda Rotua Rumondang, S.E.	198806032011012010	03 - 06 - 1988	Pengadministrasi Umum	III/c	STRATA I	P
63	Puspa Julita,	196404061990032005	06 - 04 - 1964	Pengadministrasi Umum	III/b	SLTA	P
64	Zeno Dani Kuncoro, ST	198507222011011011	22 - 07 - 1985	Ahli Pranata Komputer Pertama	III/b	STRATA I	L
65	Fetty Yuniza, SH	198206062006042008	06 - 06 - 1982	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	P
66	Fenti Widyastuti, SH	198509092008052001	09 - 09 - 1985	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	P
67	Mirianti Oktaviana Suri, SH	198910212009042001	21 - 10 - 1989	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	P
68	Sesti Sapittri, SE	198709252009122005	25 - 09 - 1987	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	P
69	Pelanggi Wijaya, SH	198702072006042003	07 - 02 - 1987	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	P
70	Muhammad Prana Cahaya, S. Kom	198306032009121004	03 - 06 - 1983	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	L
71	Mareta Isabella, SE	198903222009122001	22 - 03 - 1989	Fungsional Umum	III/b	STRATA I	P
72	Ika Ikmassari, S.H.	198810222014032001	22 - 10 - 1988	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	P
73	Rini Tri Wahyuni, S.H.	198502202014032004	20 - 02 - 1985	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	P
74	Windya Prabawati, S.H.	198805122014032006	12 - 05 - 1988	Fungsional Umum	III/b	STRATA I	P
75	Dimas Sigit Prihantoro, S.E.	198804252015011001	25 - 04 - 1988	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	L
76	Vera Anggraini, S.H.	198806112015052001	11 - 06 - 1988	Pengadministrasi Umum	III/b	STRATA I	P
77	Varlian Agustini, Amd	198102162009042008	16 - 02 - 1981	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	III/a	DIPLOMA III	P
78	Rika Anggraini, S.IP.	198908102019032005	10 - 08 - 1989	Staf	III/a	STRATA I	P
79	Irwan Kurniawan, A.Md	198703032011011006	03 - 03 - 1987	Pengadministrasi Umum	III/a	DIPLOMA III	L
80	Harini Kurniati	198507242006042001	24 - 07 - 1985	Pengadministrasi Umum	II/d	SLTA	P
81	Siska Vitriani	198512092006042002	09 - 12 - 1985	Pengadministrasi Umum	II/d	SLTA	P
82	Endang Wijaya	198005092012121001	09 - 05 - 1980	Pengadministrasi Umum	II/b	SLTA	L

2. Pengadilan Negeri Bengkulu

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Riza Fauzi, S.H., C.N.	196503261991031001	26-03-1965	Ketua	Pembina Utama Madya IV/d	S1	L
2	Marolop Simamora, S.H., M.H	196206121992121001	12-06-1962	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda IV/c	S2	L
3	Arifin Sani	196004051985121001	05-04-1960	Hakim	Pembina Utama Madya IV/d	S1	L
4	Boy Syailendra, S.H	197012261996031002	26-12-1970	Hakim	Pembina Tingkat I IV/b	S1	L
5	Immanuel, SH, MH	196702101996031004	10-02-1967	Hakim	Pembina Tingkat I IV/b	S2	L
6	Fitrizal Yanto, SH	196706011996031001	01-06-1967	Hakim	Pembina Tingkat I IV/b	S1	L
7	Chandra Gautama, S.H., M.H.	197406272002121003	27-06-1974	Hakim	Pembina IV/a	S2	L
8	Gabriel Siallagan, S.H., M.H.	197801122002121002	12-01-1978	Hakim	Pembina IV/a	S2	L
9	Maria Soraya Murniaty Br Sitinjak, SH	197808152001122002	15-08-1978	Hakim	Pembina IV/a	S1	P
10	Hanifzar, S.H., M.H.	197809282001121001	28-09-1978	Hakim	Pembina Pembina IV/a	S2	L
11	Dwi Purwanti, S.H.	197603282001122002	28-03-1976	Hakim	Pembina IV/a	S1	P
12	Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.	197806152001121003	15-06-1978	Hakim	Pembina IV/a	S2	L
13	Hascaryo, S.H., M.H.	197610312002121005	31-10-1976	Hakim	Penata Tingkat I III/d	S2	L
14	Misriyawati, SH	196204051990032001	05-04-1962	Sekretaris Tingkat Pertama Klas IA, Sekretaris	Pembina Tingkat I IV/b	S1	P
15	Ramdhani, S.H.	196712071989031006	07-12-1967	Panitera	Pembina IV/a	S1	L
16	Zulmahri, SH.	196511151983031001	15-11-1965	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA, Panitera Muda Perdata	Penata Tingkat I III/d	S1	L
17	Nani Yulianti	196103101982032002	10-03-1961	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA, Panitera Muda Hukum	Penata Tingkat I III/d	SMA	P
18	Tuty Daulay Hutabarat, SH	197007201990032001	20-07-1970	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA, Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi	Penata Tingkat I III/d	S1	P
19	Achmad Wibisono, S.Sos	196012241981021002	24-12-1960	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA, Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Penata Tingkat I III/d	S1	L
20	Hasnaniar, SH	196008151983112001	15-08-1960	Panitera Pengganti Tingkat	Penata Tingkat I III/d	S1	P

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

				Pertama, Panitera			
21	Harjumi Norheppy, S.H.	197611192006042002	19-11-1976	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata Tingkat I III/d	S1	P
22	Sukasih, S.H.	197105041993032003	04-05-1971	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata Tingkat I III/d	S1	P
23	Hasyim, SH	196301031983031003	03-01-1963	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata Tingkat I III/d	S1	L
24	Irwan Hemdi, SH	196609121989031002	12-09-1966	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata Tingkat I III/d	S1	L
25	Sidianto, SH	197108212002121003	21-08-1971	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata Tingkat I III/d	S1	L
26	Zubaidah	196402091986032002	09-02-1964	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata III/c	SMA	P
27	Rafika Ratna Surri, SH	198610162009122004	16-10-1986	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata III/c	S1	P
28	Bobo Iskandar Dinata, S.H., S.Kom, M.H.	198506262009041005	26-06-1985	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata III/c	S2	L
29	Rosnani	196206071983032002	07-06-1962	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata III/c	SMA	P
30	Linda Septriana, S. Kom., S.H., M.H	198709242009122003	24-09-1987	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata III/c	S2	P
31	Dodi Ardiyanto, S.H.	197708052006041003	05-08-1977	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata Muda Tingkat I III/b	S1	L
32	Seppi Triani, SH	198209152009042010	15-09-1982	Panitera Pengganti Tingkat Pertama, Panitera	Penata Muda Tingkat I III/b	S1	P
33	David Kurniawan	197309161994031002	16-09-1973	Juru Sita, Panitera	Penata III/c	SMA	L
34	Yanuar	197001111993031003	11-01-1970	Juru Sita, Panitera	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA	L
35	Joni Aprizal, S.Kom	197906242009041002	24-06-1979	Juru Sita, Panitera	Penata Muda Tingkat I III/b	S1	L
36	Nipi Sulastri	198003042002122002	04-03-1980	Juru Sita, Panitera	III/a	SMA	P

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

37	Fitri Astuti Mini Asyiani, SH	198108142002122001	14-08-1981	Juru Sita Pengganti, Panitera	Penata III/c	S1	P
38	Siska Tri Handayani, ST	198405312009042008	31-05-1984	Juru Sita Pengganti, Panitera	Penata III/c	S1	P
39	Riza Noplailly, S.Kom, SH, MH	198511022009042008	02-11-1985	Juru Sita Pengganti, Panitera	Penata III/c	S2	P
40	Tri Purnomo	196502161990031001	16-02-1965	Juru Sita Pengganti, Panitera	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA	L
41	Marni Susanti, SH	197609112006042002	11-09-1976	Juru Sita Pengganti, Panitera	Penata Muda Tingkat I III/b	S1	P
42	Mudriyanti, SE	197308122006042001	12-08-1973	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Penata Tingkat I III/d	S1	P
43	Wahfi Zuli, SE	198601042009121003	04-01-1986	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	Penata III/c	S1	L
44	Novriyani Kemala Dewi, S.T.	198711062011012007	06-11-1987	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	Penata III/c	S1	P
45	Nisyak Fitriani, S.H	198805012011012013	01-05-1988	Pengadministrasi Umum, Panitera Muda Pidana	Penata III/c	S1	P
46	Rahmat Febrianto, S.Kom	198402012009121005	01-02-1984	Pengadministrasi Umum, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	Penata III/c	S1	L
47	Prema Dessy Tiana, SKM	198412292015012001	29-12-1984	Pengadministrasi Umum, Panitera Muda Perdata	Penata Muda Tingkat I III/b	S1	P
48	Tri Sulisiono, SE, SH	198606072009041004	07-06-1986	Pengadministrasi Umum, Panitera Muda Pidana	Penata Muda Tingkat I III/b	S1	L
49	Ismidi	196509041992031004	04-09-1965	Staf, Sekretaris	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA	L
50	Dwindra Agung, SH	198612122006041002	12-12-1986	Pengadministrasi Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	Penata Muda Tingkat I III/b	S1	L
51	Duice Indrawati, S.E.	198707312019032005	31-07-1987	Staf,	Penata Muda III/a	S1	P
52	Fandy Juniario Simorangkir, S.Kom.	199306242019031004	24-06-1993	Fungsional Umum,	Penata Muda III/a	S1	L
53	Yun Herawati, A.Md	197911202009042003	20-11-1979	Pengadministrasi Umum, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Penata Muda III/a	D3	P
54	Agustia	198308172006042002	17-08-1983	Pengadministrasi Umum, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	engatur Tingkat I II/d	SMA	P
55	Bobby Yuhara	198908172009041001	17-08-1989	Pengadministrasi Umum,	Pengatur Muda Tingkat	SMA	L

				Panitera Muda Hukum	I II/b		
56	Dody Priawan	197708232014081002	23-08-1977	Fungsional Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	Pengatur Muda Tingkat I II/b	SMA	L

3. Pengadilan Negeri Curup

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SYARIP. S.H., M.H.	196404071993031002	07 April 1964	KETUA	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	SASTRA 2	L
2	ARI KURNIAWAN, S.H.	197108171992031006	17 Agustus 1971	HAKIM	PEMBINA TK.I (IV/b)	STRATA 1	L
3	ANNIE SAFRINA SIMANJUTAK, S.H.	197511121998032001	12 November 1975	HAKIM	PEMBINA TK.I (IV/b)	STRATA 1	P
4	RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.	197610272001121003	27 Oktober 1976	HAKIM	PEMBINA (IV/a)	SASTRA 2	L
5	HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.	197811272003121002	27 November 1978	HAKIM	PENATA TK.I (III/d)	SASTRA 2	L
6	FAHKRUDDIN, S.H., M.H.	197811022003121001	2 November 1978	HAKIM	PENATA TK.I (III/d)	SASTRA 2	L
7	RELSON MULYADI NABABAN, S.H.	197905252005021001	25 Mei 1979	HAKIM	PENATA TK.I (III/d)	STRATA 1	L
8	NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.	197801272005021001	27 Januari 1978	HAKIM	PENATA TK.I (III/d)	STRATA 1	L
9	IRSANUDIN, S.H.	197106131993031006	13 Juni 1971	PANITERA	PEMBINA (IV/a)	SASTRA 2	L
10	SRI SISKI YANTI, S.Sos., M.Si	198407062009042007	06 Juli 1984	SEKRETARIS	PENATA TK.I (III/d)	SASTRA 2	P
11	AZIZ WIRAWAN, S.H.	196108301983111001	30 Agustus 1961	PANMUD HUKUM	PENATA TK.I (III/d)	STRATA 1	L
12	WARYONO, S.H.	197204102000121005	10 April 1972	PANMUD PERDATA	PENATA (III/c)	STRATA 1	L
13	AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.	197203312000121002	31 Maret 1972	PANMUD PIDANA	PENATA (III/c)	STRATA 1	L
14	DEBIE RUSDIANSYAH, S.H.	198512252009041004	25 Desember 1985	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STRATA 1	L
15	RIAN ROBSEN, S.H.	198406192011011005	19 Juni 1984	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	PENATA (III/c)	STRATA 1	L
16	RIZA UMAMI, S.H., M.H.	198405302008012004	30 Mei 1984	PANITERA PENGANTI	PENATA (III/c)	SASTRA 2	P
17	MARGIYATI, S.H.	197803312002122003	31 Maret 1978	PANITERA PENGANTI	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STRATA 1	P
18	FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.	198604112006041001	11 April 1986	PANITERA PENGANTI	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STRATA 1	L
19	RIKA USLIA, S.H.	198305302009042011	30 Mei 1983	PANITERA PENGANTI	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STRATA 1	P
20	PUSPITA DEWI, S.H.	198606232009042007	23 Juni 1986	PANITERA PENGANTI	PENATA MUDA (III/a)	STRATA 1	P
21	YUSLAINI, S.H.	196905231993032002	23 Mei 1969	JURUSITA	PENATA TK.I (III/d)	STRATA 1	P

22	SARKAWI	196506021991031003	2 Juni 1965	JURUSITA	PENATA MUDA TK.I (III/b)	SMA	L
23	RIA MARGARETA, S.H.	198303182009042012	18 Maret 1983	JURUSITA PENGGANTI	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STRATA 1	P
24	RESTI DESANJAYA, SKM	198701012011012006	1 Januari 1987	FUNGSIONAL UMUM	PENATA (III/c)	STRATA 1	P
25	WITRI ROSSANTI, S.T	199009062015032001	06 September 1990	PELAKSANA	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STRATA 1	P
26	NORMA MARISA YOHANA, S.H.	198408142019032006	14 Agustus 1984	CPNS APP	PENATA MUDA (III/a)	STRATA 1	P

4. Pengadilan Negeri Manna

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	HERI KURNIAWAN, S.H., MH	197208311994031002	31 Agustus 1972	KETUA	IVb/Pembina Tk. 1	S2	Laki-laki
2.	ZULKARNAEN, SH	197509112000121003	11 September 1975	WAKIL KETUA	IVa/Pembina	S1	Laki-laki
3	DINI ANGGRAINI, SH	198303012007042001	01 maret 1983	HAKIM	IIId/Penata Tk. 1	S2	Perempuan
4	ENNY OKTAVIANA, SH	198810292011012010	29 oktober 1988	HAKIM	IIId/Penata	S1	Perempuan
5.	ABDUL MUIS, SH	196104201983111001	20 April 1961	PANITERA	IIId/Penata Tk.1	S1	Laki-laki
6.	HERI HERYANTO, SH	197206031993031002	03 Juni 1972	SEKRETARIS	IIId/Penata Tk.1	S1	Laki-laki
7.	MANZIR, SH	196603191998031002	19 Maret 1966	PANMUD PERDATA	IIId/Penata Tk.1	S1	Laki-laki
8.	PURNAMASURI	196111211983032004	12 Desember 1961	PANITERA PENGGANTI	IIId/Penata	SLTA	Perempuan
9.	SAMIDI, SH	196903171993031004	17 Maret 1969	KASUBBAN G	IIId/Penata Tk.1	S1	Laki-laki
10.	MIRZAN EPENDI, A.Md	196302211983031003	21 Februari 1963	PANMUD PIDANA	IIId/Penata	DIPLOMA III	Laki-laki
11.	FIKO JUWANDA PUTRA, SH	198306102011011007	10 Juni 1983	PANMUD HUKUM	IIId/Penata	S1	Laki-laki
12.	VERA TRISIANA, SH	198508112011012017	11 Agustus 1985	KASUBBAN G UP	IIId/Penata	S1	Perempuan
13.	PEDRO MARYADI, SH	198007032014081002	03 Juli 1980	KASUBBAN G	IIId/PenataMuda	S1	Laki-laki
14.	R.M HENDRA KS, A.Md	198212302009121004	30 Desember 1982	PANITERA PENGGANTI	IIId/PenataMuda	S1	Laki-laki
15.	SISKA ARYANI	198102022001122002	02 Februari 1981	JSP	IIId/PenataMuda	SLTA	
16.	HIKMA ZULHAKIM	197508062006041003	06 Agustus 1975	STAF	IIId/Pengatur Tk. I	SLTA	Laki-laki
17.	ANGGA ANDIKA ARNOLD	198710232006041001	23 Oktober 1987	BENDAHARA	IIId/Pengatur Tk. I	SLTA	Laki-laki
18.	LILI KUSNI	196905111992032003	11 Mei 1969	STAF	IIId/PenataMuda Tk. I	SLTA	Perempuan
19.	RUDANTI WIDIANUSITA, SH	198812192017122001	19 Desember 1988	CAKIM	IIId/PenataMuda	S1	Perempuan
20.	SYAFITRI APRIYUANI S, SH	199204052017122002	05 April 1992	CAKIM	IIId/PenataMuda	S1	Perempuan
21.	RIAS LAEL PARAHITA NANDINI, SH	199309022017122001	02 September 1993	CAKIM	IIId/PenataMuda	S1	Perempuan
22.	RINI AYULESTARI, SH	199501172017122002	17 Januari 1995	CAKIM	IIId/PenataMuda	S1	Perempuan
23.	SRI WIYANTI, MPD	197904142003122004	14 April 1979	Staf	IVa/ Pembina	S2	Perempuan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

24	FERNANDES OKTOVANO, SH	198810162014031002	16 Oktober 1988	Staf	III.b/PenataMuda Tk. I	S1	Laki-laki
25	RENY KUMALASARI		15 Desember 1981	Tenaga Kontrak		SLTA	Perempuan
26	YEYEN MULYADI, SPD.I		28 Agustus 1983	Tenaga Kontrak		S1	Laki-laki
27	AYU AMELIA PRANSISKA, Amd		09 November 1994	Tenaga Kontrak		DIPLOMA III	Perempuan
28	SUGIANTO		13 Juli 1980	Tenaga Kontrak		SLTA	Laki-laki
29	OYAN SUDIRJA		17 Maret 1996	Tenaga Kontrak		SLTA	Laki-laki
30	TOMY KURWANTO, SH		02 Juni 1982	Tenaga Kontrak		S1	Laki-laki
31	NOVTEN AGUNG. W. WILI		10 November 1988	Tenaga Kontrak		SLTA	Laki-laki
32	MUHAMAD NAZARUDIN, S.SOS		29 Maret 1995	Tenaga KerjaSukare la		S1	Laki-laki
33	ANGGUN MAYA SARI		11 Juni 1995	Tenaga KerjaSukare la		SLTA	Perempuan
34	RAHMAD ILAHI, S.SI		16 Juni 1990	Tenaga KerjaSukare la		S1	Laki-laki
35	JUNAHARUDIN		02 Juni 1973	Tenaga KerjaSukare la		SLTA	Laki-laki

5. Pengadilan Negeri Argamakmur

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FAJAR KUSUMA AJI., SH., MH.	197306081999031005	08 - 06 - 1973	KETUA	IV/b	Pascasarjana	L
2.	FIRDAUS AZIZY, SH., MH	198408232009121005	23 -08 - 1984	HAKIM	III/c	Pascasarjana	L
3.	ELDI NASALI, S.H., M.H	198610012009121001	01 - 10 - 1986	Hakim	III/c (Penata)	Pascasarjana	L
4.	RINA FASIOLO, SH	197206231993032003	23 - 06 - 1972	Panitera	III/d (Penata Tingkat I)	STRATA I	P
5.	ROSMINAR A. PURBA, S.Kom	198008282006042005	28 - 08 - 1980	Sekretaris	III/d (Penata Tingkat I)	STRATA I	P
6.	T.S. PRAMUJI, SH.	198208112002121002	11 - 08 - 1982	Panmud Pidana	III/c (Penata)	STRATA I	L
7.	FAHRULYAN HARSONI,SH	198601032006041001	03 - 01 - 1986	Panmud Perdata	III/b (Penata Muda Tingkat I)	STRATA I	L
8.	EDO ROMADHONA, S.Kom	198705102011011018	10 - 05 - 1987	Ka. Sub. Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan	III/c (Penata)	STRATA I	L
9.	RESMI HERMINI, SH,MH.	198302032011012012	03 - 02 - 1983	Ka. Sub, Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana	III/c (Penata)	Pascasarjana	P
10.	HARIANTO DWI SAPUTRA, SE, SH	198201092006041003	09 - 01 - 1982	Ka. Sub umum dan keuangan	III/d (Penata Tingkat I)	STRATA I	L
11.	ENARIAH	196401101984122002	10 - 01 - 1964	Panitera Pengganti / Staf Perdata	III/c (Penata)	SLTA	P
12.	HERIYANTO	196209201983031002	20 - 09 - 1962	Panitera Pengganti	III/c (Penata)	SLTA	L
13.	NASRI	196407281993031002	28 - 07 - 1964	Jurusita / Staf Perdata	III/b (Penata Muda Tingkat I)	SLTA	L

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

14.	MELLY TRIANA, SP, MH	197005011993032007	01 - 05 - 1970	Jurusita / Staf Hukum	III/c (Penata)	Pascasarjana	P
15.	HALOMOAN SIMANJUNTAK, S.H.	199006072014031003	07 - 06 - 1990	Staf Pidana	III/b (Penata Muda Tingkat I)	STRATA I	L
16.	CICI ERYA UTAMI SH.	198911112012122001	11 - 11 - 1989	Bendahara	III/b (Penata Muda Tingkat I)	STRATA I	P
17.	ELFRIEDE, SE	199506132019032010	13 - 06 - 1995	Cpns Staf Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	III/a (Penata Muda)	STRATA I	P

6. Pengadilan Negeri Bintuhan

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PURWANTA, SH., MH	197901112001121003	11-01-1979	KETUA	IV.a	S2	L
2.	ASTAWI, SH	197010161993031004	16-10-1970	PANITERA	III.d	S1	L
3.	AVIF P. RAHMAN, S.Kom	198401192009041003	19-01-1984	SEKRETARIS	III.c	S1	L
4.	DWI ENY SUSIYANI, SH	197712292011012003	29-12-1977	PANITERA PENGGANTI	III.c	S1	P
5.	ERIF ERLANGGA, SH	198603042011011010	04-03-1986	HAKIM	III.c	S1	L
6.	ALTO ANTONIO, SH., MH	198805252011011010	25-05-1988	HAKIM	III.c	S2	L
7.	HADEPA ZUHDI, SH., MH	197905252006042003	25-05-1979	PANITERA MUDA PIDANA	III.b	S2	P
8.	WINASTA PISCESA, SH	198603082012122002	08-03-1986	KASUB PTIP	III.b	S1	P
9.	AHMAHANGGI NUGRAHA, SH	198805202012121003	20-05-1988	PANITERA MUDA HUKUM	III.b	S1	L
10	YENNI KOMALASARI, SH	198908072012122002	07-08-1989	KASUB KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	III.b	S1	P
11	LISTIKA RAHMA DANIA, SH	198804262014032001	26-04-1988	KASUB UMUM & KEUANGAN	III.b	S1	P
12	HARYA PUTERATAMA, SH	199005232014032001	23-05-1990	PANITERA PENGGANTI	III.b	S1	L
13	SARAH DEBY, SH	199204092017122002	09-04-1992	CPNS/CAKIM	III.a	S1	P
14	ROULY R. NATALIA, SH	199212182017122002	18-12-1992	CPNS/CAKIM	III.a	S1	P
15	MIRANTI P. PRATIWI, SH	199305172017122002	17-05-1993	CPNS/CAKIM	III.a	S1	P
17	SEPTINA, SH	199509152017122003	15-09-1995	CPNS/CAKIM	III.a	S1	P
18	VICTOR A. STEPANUS, SE	199104132019031007	13-04-1991	CPNS	III.a	S1	L

7. Pengadilan Negeri Tais

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ERWINDU, S.H.	197711252001121001	25-11-1977	Ketua	IV/a	S1	L

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2	HENY FARIDHA, S.H., M.H.	197505152002122002	15-05-1975	Wakil Ketua	IV/a	S2	P
3	MERRY HARIANAH, S.H., M.H.	198101062007042001	06-01-1981	Hakim	III/d	S2	P
4	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.	198203072007041001	07-03-1982	Hakim	III/d	S2	L
5	HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.	197212221993031003	22-12-1972	Panitera	III/d	S2	L
6	HABIBUDDIN, S.H.	196906211989031002	21-06-1969	Sekretaris	III/d	S1	L
7	HAIRUL IKSAN	196206211983031007	21-06-1962	Panmud Hukum	III/b	SLTA	L
8	JUMARDI LISMAN, S.H.	198006132006041004	13-06-1980	Panmud Perdata	III/d	S1	L
9	AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.	198311072006041004	07-11-1983	Panmud Pidana	III/c	S1	L
10	DECKY CANDRA IRAWAN, S.E.	198312152009041003	15-12-1983	Kasubbag Kepegawaian, Ortaia	III/c	S1	L
11	ARI ADRINA, S.E.	198703132011012025	13-03-1987	Kasubbag Umum & Keuangan	III/c	S1	P
12	IRDIAN NOFRIANSYAH, S.H.	198511072006041005	07-11-1985	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	III/b	S1	L
13	ENDANG, S.H.	197801082009041002	08-01-1978	Panitera Pengganti	III/c	S1	L
14	ANITA MAYASARI, S.H., M.H.	198408252005022001	25-08-1984	Panitera Pengganti	III/b	S2	P
15	ANNA LESTARI, S.H.	199008302009122001	30-08-1990	Panitera Pengganti	III/b	S1	P
16	TRANMIARSO	198301182009121004	18-01-1983	Jurusita	II/c	SMK	L
17	JAYADI, A.Md.	198010162011011004	16-10-1980	Jurusita Pengganti	III/a	DIII	L
18	AGUNG TRIPUTRA, S.H.	198806132012121001	13-06-1988	Jurusita Pengganti	III/b	S1	L
19	ADI GUNA LUKITO, S.H.	198904042012121001	04-04-1989	Jurusita Pengganti	III/b	S1	L
20	JOIS MENETI, S.H.	198001212007012001	21-01-1980	Analisis Perkara Peradilan	III/c	S1	P
21	DINNA MUHARROKHMAH, S.H.	198111212012122001	21-11-1981	Staf	III/b	S1	P
22	GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H.	199109042017122002	04-09-1991	Cakim	III/a	S1	P
23	ANDI BUNGAWALI ANASTASIA, S.H.	199204302017122001	30-04-1992	Cakim	III/a	S1	P
24	MURNIAWATI PRISCILIA DJAKSA DJAMALUDDIN, S.H.	199211292017122001	29-11-1992	Cakim	III/a	S1	P
25	NESIA HAPSARI, S.H.	199309032017122003	03-09-1993	Cakim	III/a	S1	P
26	SAWALLIA ANDRIYANI	198705292009122007	29-05-1987	Staf	II/c	SMK	P

8. Pengadilan Negeri Kepahiang

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. RIMDAN, S.H., M.H.	197302011993031003	01-02-1973	Ketua	Pembina Tk. I / IV/b	S3	L
2.	IRWIN ZAILY, S.H., M.H.	197311012000031001	01-11-1973	Wakil Ketua	Pembina / IV/a	S2	L
3.	YONGKI, S.H.	197902052008051001	05-02-1979	Hakim	Hakim Pratama	S1	L

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

					Madya III/c		
4.	HARMEN, S.H.	197001031993031003	03-01-1970	Panitera	Penata Tk. I / III/d	S1	L
5.	ACHWAN ZARNUBI, S.H.	197507212008051001	21-07-1975	Sekretaris	Penata / III/c	S1	L
6.	SYAWALUDDIN, S.H.	198008182007041001	18-08-1980	Panmud Perdata	Penata / III/d	S1	L
7.	EVI WULANDARI, S.H.	198203102009042007	10-03-1982	Panmud Hukum	Penata Muda Tk. I / III/b	S1	P
8.	RUSMAWAN CATYOGA, S.E.	197804132011011005	13-04-1978	Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Tk. I / III/c	S1	L
9.	PUTERI OCTARIA INDAH SARI, S.H.	198410242014032003	24-10-1984	Kasub Kepegawaian dan Ortala	Penata Muda Tk. I / III/b	S1	P
10.	DIAN RIZKI PUTRI, S.H.	198609272012122002	27-09-1986	Kasub Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. I / III/b	S1	P
11.	ARIS SUGIANTO, S.H.	198303142011011008	14-03-1983	Panitera Pangganti	Penata Muda Tk. I III/b	S1	L
12.	AKHMAD TRI HABIBI, S.H.	198212092012121001	09-12-1982	Panitera Pangganti	Penata Muda Tk. I III/b	S2	L
13.	TRI HARIYANTI, S.H., M.H.	198306302009122003	30-06-1983	Panitera Pangganti	Penata Muda Tk. I III/b	S2	P
14.	RIZKA ARI FANDI	199001202009041001	20-01-1990	Juru Sita	Pengatur II/c	SMA	L
15.	DIOBA SAPUTRA	198907152009121002	15-07-1989	Juru Sita Pengganti	Pengatur II/c	SMA	L
16.	YURIS PRAWIRATAMA, S.H.	198709192012121001	19-09-1987	Staf Pidana	Penata Muda Tk. I III/b	S1	L
17.	YEYEN KURNIADI, S.H.	199001202012121001	20-01-1990	Staf Pidana	Penata Muda Tk. I III/b	S1	L
18.	TEMY EKA PUTRA	198506212009121001	21-06-1985	Staf Subbag Umum dan Keuangan	Pengatur Muda Tk. I II/b	SMA	L
19.	TIA NURTIHANA, S.Psi.	199305042019032013	04-05-1993	CPNS/Staf Perdata	Penata Muda/III/a	S1	P
20.	RIZKI FEBRIANTI, S.H.	199102212017122001	21-02-1991	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1	P
21.	TIOMINAR MANURUNG, S.H.	199208162017122002	16-08-1992	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1	P
22.	ANTON ALEXANDER, S.H.	199304152017121005	15-04-1993	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1	L
23.	EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H.	199311302017122001	30-11-1993	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1	P

9. Pengadilan Negeri Tubei

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH., MH.	197705232001121002	23-05-1977	KETUA	PEMBINA (IV/a)	S2	L
2.	AGUS WINDANA, SH	197608212002121003	21-08-1976	WAKIL KETUA	PEMBINA (IV/a)	S1	L
3.	ZEPHANIA, SH., MH.	198608032009041002	03-08-1986	HAKIM	PENATA (III/c)	S2	L

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

4.	SUJOKO, SH., MH.	197009271993031004	27-09-1970	PANITERA	PEMBINA (IV/a)	S2	L
5.	FADIAN DELLA	196411111990031003	11-11-1964	SEKRETARIS	PENATA (III/c)	SMA	L
6.	HENDRI M, SH	198609052009121004	05-09-1986	PANMUD PERDATA	PENATA (III/c)	S1	L
7.	ARIF BUDIMAN, SH	198406112011011010	11-06-1984	PANMUD HUKUM	PENATA (III/c)	S1	L
8.	BONI MANIK, SH	198304162009121004	16-04-1983	PANMUD PIDANA	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1	L
9.	THOMAS SILYAMET	197303231993031001	23-03-1973	KASUB PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	PENATA MUDA TK.I (III/b)	SMA	L
10.	YANIK NURUL FATIMAH, SH	198912072012122001	07-12-1989	KASUB UMUM & KEUANGAN	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1	P
11.	ANGGUN PRIMA L. TOBING, SH	198912232014031004	23-12-1989	KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1	L
12.	FIGAR WIBOWO, SH	198602262014031002	26-02-1986	JURUSITA PENGGANTI	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1	L
13.	JONA AGUSMEN, SH	198708242017121002	24-08-1987	CALON HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	S1	L
14.	KURNIA RAMADHAN, SH	199203082017121005	08-03-1992	CALON HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	S1	L
15.	HENDRO HEZKIEL SIBORO, SH	199401122017121004	12-01-1994	CALON HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	S1	L
16.	MARIA MINERVA KAINAMA, SH	199403152017122001	15-03-1994	CALON HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	S1	P

10. Pengadilan Negeri Mukomuko

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.	197005101990021003	10-05-1970	Ketua	IV (b)	S3	Laki-Laki
2	Junita Pancawati, S.H., M.H.	197706122001122001	12-06-1977	Wakil Ketua	IV (a)	S2	Laki-Laki
3	Achmad Fachrurrozi, S.H.	198806272011011004	27-06-1988	Hakim	III (c)	S1	Laki-Laki
4	Tarzanto, S.H.	196910121993031002	12-10-1969	Panitera	III (d)	S1	Laki-Laki
5	Lanny Simanjuntak, S.Si.	198304152006042002	15-04-1983	Sekretaris	III (d)	S1	Perempuan
6	Asep Riyanto, S.H.	198109262006041002	26-10-1981	Panmud Pidana	III (c)	S1	Laki-Laki
7	Roy Hendika, S.H.	198506052009121003	05-06-1985	Panmud Perdata	III (c)	S1	Laki-Laki
8	Periyanto, S.H.	198701022006041003	02-01-1987	Panmud Hukum	III (b)	S1	Laki-Laki

9	Kennas Lawsa Temsi, S.H.	199007072014031002	07-07-1990	Kasub Umum & Keuangan	III (b)	S1	Laki-Laki
10	Muammar Gadafi, A.Md	198205202008051001	20-05-1982	Kasub Kepegawaian , Ortala	III (a)	D3	Laki-Laki
11	Awang Wijagata, S.H.	199108302019031004	30-08-1991	Staf	III (a)	S1	Laki-Laki
12	Putri Jesika Purba, S.H.	199203072019032013	07-03-1992	Staf	III (a)	S1	Perempuan
13	Syukri Alfian, S.H.	197605012009121001	01-05-1976	Jurusita	III (a)	S1	Laki-Laki
14	Jona Adloga Keliat, A.Md	198804112019031009	11-04-1988	Staf	II (c)	D3	Laki-Laki

MUTASI

Data mutasi pegawai pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel berikut :

NO	SATUAN KERJA	MUTASI MASUK		MUTASI KELUAR	
		Hakim	Pegawai	Hakim	Pegawai
1	Pengadilan Tinggi Bengkulu	8 orang	9 orang	3 orang	-
2	Pengadilan Negeri Bengkulu	3 orang	2 orang	3 orang	-
3	Pengadilan Negeri Curup	1 orang	3 orang	-	-
4	Pengadilan Negeri Manna	-	1 orang	-	1 orang
5	Pengadilan Negeri Arga makmur	-	1 orang	-	1 orang
6	Pengadilan Negeri Bintuhan	-	-	-	1 orang
7	Pengadilan Negeri Tais	1 orang	2 orang	1 orang	1 orang
8	Pengadilan Negeri Kepahiang	-	2 orang	1 orang	4 orang
9	Pengadilan Negeri Tubei	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
10	Pengadilan Negeri Mukomuko	-	-	-	1 orang

PROMOSI

Pelaksanaan fungsi pembinaan karier bagi hakim dan karyawan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilakukan promosi yang berguna selain untuk penyegaran juga diharapkan meningkatkan produktifitas kerja. Adapun data promosi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	SATKER	KPT/ KPN	WKPT/ WKPN	Hakim	Panitera	Sekretaris	Kabag	Panmud	Kasub	PP	Jurusita	Jumlah
1	PT Bengkulu	1	1	4	1	1	-	-	-	2	-	10
2	PN Bengkulu	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
3	PN Curup	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	PN Manna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	PN Arga makmur	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

6	PN Bintuhan	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
7	PN Tais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
8	PN Kepahiang	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
9	PN Tubei	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4
10	PN Mukomuko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENSIUN

Jumlah Hakim dan Pegawai di yang pensiun atau purnabakti di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
1	Pengadilan Tinggi Bengkulu	2 orang
2	Pengadilan Negeri Bengkulu	1 orang
3	Pengadilan Negeri Curup	2 orang
4	Pengadilan Negeri Manna	-
5	Pengadilan Negeri Arga makmur	-
6	Pengadilan Negeri Bintuhan	-
7	Pengadilan Negeri Tais	-
8	Pengadilan Negeri Kepahiang	-
9	Pengadilan Negeri Tubei	-
10	Pengadilan Negeri Mukomuko	-
	Jumlah	5 orang

DIKLAT

Hakim dan pegawai yang mengikuti Diklat (SDM Teknis/Non teknis) pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	SATKER	TEKNIS	NON TEKNIS	JUMLAH
1	Pengadilan Tinggi Bengkulu	5 orang	8 orang	13 orang
2	Pengadilan Negeri Bengkulu	15 orang	4 orang	19 orang
3	Pengadilan Negeri Curup	4 orang	1 orang	5 orang
4	Pengadilan Negeri Manna	-	-	-
5	Pengadilan Negeri Argamakmur	-	-	-
6	Pengadilan Negeri Bintuhan	-	1 orang	1 orang
7	Pengadilan Negeri Tais	1 orang	-	1 orang
8	Pengadilan Negeri Kepahiang	-	1 orang	1 orang
9	Pengadilan Negeri Tubei	-	-	-
10	Pengadilan Negeri Mukomuko	-	-	-
	Jumlah	25 orang	15 orang	40 orang

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari APBN tersebut mengacu pada peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya, baik pejabat yang ditunjuk untuk pengelola keuangan, specimen bank, maupun batasan tugas masing-masing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta peraturan perubahannya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
PENGADILAN TINGGI BENGKULU	22.399.250.000	22.194.569.198	204.680.802	99,08
PENGADILAN NEGERI BENGKULU	18.595.766.000	18.581.285.878	14.480.122	99,92
PENGADILAN NEGERI CURUP	4.551.077.000	4.474.372.150	76.704.850	98,31
PENGADILAN NEGERI MANNA	3.235.132.000	3.169.017.511	66.074.489	97,95
PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	3.809.866.000	3.572.971.937	236.894.063	93,78
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	2.436.562.000	2.383.061.318	93.207.911	97,80
PENGADILAN NEGERI TAIS	3.313.132.000	3.237.241.777	75.890.223	97,70
PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	3.213.941.000	3.180.483.503	33.5457.497	98,95
PENGADILAN NEGERI TUBEI	2.653.465.000	2.570.144.325	83.320.675	96,85
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	2.863.021.000	2.824.740.790	38.280.210	98,66

DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM

SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
PENGADILAN TINGGI BENGKULU	127.939.000	126.154.000	1.785.000	98,61
PENGADILAN NEGERI BENGKULU	508.170.000	505.710.001	2.459.999	99,51
PENGADILAN NEGERI CURUP	117.600.000	116.311.900	1.288.100	98,90
PENGADILAN NEGERI MANNA	59.100.000	57.856.500	1.243.500	97,89
PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	105.900.000	104.042.750	1.857.250	98,25
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	61.440.000	59.814.300	1.625.700	97,35
PENGADILAN NEGERI TAIS	103.560.000	101.698.250	1.861.750	98,20
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	91.360.000	90.451.000	909.000	99,01
PENGADILAN NEGERI TUBEI	47.400.000	47.340.500	59.500	99,87
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	70.800.000	70.293.500	506.500	99,28

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki Barang Inventaris yang tersebar di 9 Pengadilan, semua barang inventaris telah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN dan diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun data yang berkenaan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:

KENDARAAN DINASPENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	KENDARAAN RODA 4					
1.	Toyota Corolla Altis	2007	Baik			BD 5
2.	Toyota Vios	2012	Baik			BD 1979 LR
3.	Toyota Corolla Altis	2008	Baik			BD 1966 LW
4.	Toyota Rush	2009	Baik			BD 1755 AY
5.	Toyota Kijang Innova	2011	Baik			BD 1891 AY
II	KENDARAAN RODA 2					
1.	Honda Karisma	2005	Baik			BD 3056 AY
2.	Honda Astrea C 86	1997	Baik			BD 2148 AY
3.	Honda Karisma	2003	Baik			BD 5563 AY
4.	Honda NF 125 D (Karisma)	2003	Baik			BD 5564 AY

5.	Honda Supra X 125	2005	Baik			BD 3360 AY
6.	Honda Supra X 125	2005	Baik			BD 3361 AY
7.	Honda supra x 125	2005	Baik			BD 3364 AY
8.	Honda Supra x 125	2005	Baik			BD 3363 AY
9.	Honda Supra x 125	2005	Baik			BD 3362 AY
10.	Honda Mega Pro	2007	Baik			BD 4962 AY
11.	Honda Mega Pro	2011	Baik			BD 6701 AY

PENGADILAN NEGERI BENGKULU

No	Nama Kendaraan	Tahun	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Sedan Vios	2006	1			
2	Kijang Innova	2011	3			
3	Minibus	2001	1			
4	Minibus	2006		1		
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Mega Pro	2006	2			
2	Honda Kharisma	2005		1		
3	Honda Supra X	2005	2			
4	Vixion	2011	1			

PENGADILAN NEGERI CURUP

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
*	Minibus					
1	STATION WAGON INNOVA	2006	-	√	-	-
2	TOYOTA INNOVA	2011	√	-	-	BD 1508 KY
3	TOYOTA INNOVA	2011	√	-	-	BD 1509 KY
No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
*	Sepeda Motor					
1	Honda Supra	2006	-	√	-	BD 2172 KY

2	Honda Supra	2006	-	√	-	BD 2171 KY
3	Honda Supra	2007	-	√	-	BD 2539 KY
4	Yamaha Vega R	2008	-	√	-	BD 2740 KY
5	Yamaha Vega R	2008	-	√	-	BD 2741 KY
6	Honda GL Pro	2012	√	-	-	BD 3155 KY
7	Honda GL Pro	2012	√	-	-	BD 3156 KY (HILANG)

PENGADILAN NEGERI MANNA

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	KENDARAAN RODA 4					
1.	Toyota Kijang LSX	2003	Baik			BD 1123 BY
2.	Toyota Innova	2006	Baik			BD 1048 LY
3.	Toyota Innova	2012	Baik			BD 1195 BY
II	KENDARAAN RODA 2					
1.	Honda Supra	2007	Baik			BD 2782 BZ
2.	Honda Supra	2005	Baik			BD 2610 BZ
3.	Honda Supra	2005	Baik			BD 2611 BZ
4.	Honda Grand	1997		Rusak Ringan		BD 5576 BZ
5.	Honda Grand	1997		Rusak Ringan		BD 5575 BZ
6.	Yamaha Alpha	1996			Rusak Berat	BD 5479 BZ
7.	Suzuki A 100	1992			Rusak Berat	BD 5251 BZ
8.	Suzuki A 100	1981			Rusak Berat	BD 5021 BZ

PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	KENDARAAN RODA 4					
1.	Toyota Kijang Innova	2010		Rusak Ringan		
2.	Toyota Kijang Innova	2011	Baik			
3	NEW FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T VIN 2019	2019	Baik			
II	KENDARAAN RODA 2					
1.	Yamaha Force	2013	Baik			
2.	Yamaha Force	2013	Baik			

3.	Yamaha Force	2013	Baik			
4.	Yamaha Force	2013	Baik			
5.	Yamaha Jupiter MX	2013	Baik			
6.	Honda Supra X	2006		Rusak Ringan		
7.	Honda Supra X	2006		Rusak Ringan		
8.	Honda Mega Pro	2007		Rusak Ringan		

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	KENDARAAN RODA 4					
1.	Toyota Fortuner	2017	Baik			
2.	Toyota Kijang Innova	2008	Baik			
II	KENDARAAN RODA 2					
1.	Honda Supra X	2012	Baik			
2.	Honda Supra X	2012	Baik			
3.	Honda Supra X	2012	Baik			
4.	Honda Supra X	2015	Baik			

PENGADILAN NEGERI TAIS

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
*	Minibus					
1	BD 1974 PZ	2012	√	-	-	-
2	BD 1743 PS	2016	√	-	-	Pinjam Pakai
II	Jenis Kendaraan Roda II					
	Sepeda Motor					
1	BD 2162 PY	2013	√	-	-	-
2	BD 2163 PY	2013	√	-	-	-
3	BD 2778 PY	2013	√	-	-	-
4	BD 2940 PY	2014	√	-	-	-

PENGADILAN NEGERI KEPAHANG

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Innova	2009	Baik	-	-	Penyerahan dari MA
2.	Toyota Fortuner	2015	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
3.	Toyota Avanza	2018	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
4.	Suzuki APV	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
2.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
3.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri
4.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri

PENGADILAN NEGERI TUBEI

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	BD 1927 HY	2018	√	-	-	-
2	BD 1397 HY	2018	√	-	-	-
3	BD 1961 HZ	2009	√	-	-	-
II	Jenis Kendaraan Roda II					
	Sepeda Motor					
1	BD 2306 HY	2018	√	-	-	-
2	BD 2365 HY	2018	√	-	-	-
3	BD 2627 HY	2018	-	-	√	-
4	BD 2749 HY	2012	-	-	√	-
5	BD 2894 HY	2016	√	-		-

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	BD 5 N	1	1	0	0	Kendaraan Dinas Ketua/Pinjam Pakai

						Pemda
2.	BD 1420 NY	1	1	0	0	Kendaraan Dinas Wakil Ketua
II Jenis Kendaraan Roda 2						
1.	BD 5183 NY	1	1	0	0	Kendaraan Operasional Panitera
2.	BD 5182 NY	1	1	0	0	Kendaraan Operasional Sekretaris

RUMAH DINAS

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	1 Unit	1 Unit			Ditempati = 8 Unit Tidak Ditempati = 0 Unit
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1 Unit	1 Unit			
3.	Rumah Dinas Hakim Tinggi	5 Unit	5 Unit			
4.	Rumah Dinas Panitera	1 Unit	1 Unit			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-			

PENGADILAN NEGERI BENGKULU

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	1 Unit		1 Unit		
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1 Unit		1 Unit		
3.	Rumah Dinas Hakim	9 Unit		3 Unit	6 Unit	
4.	Rumah Dinas Panitera	1 Unit			1 Unit	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-				Belum Ada

PENGADILAN NEGERI CURUP

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	1 Unit	1 Unit			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1 Unit		1 Unit		

3.	Rumah Dinas Hakim	10 Unit		10 Unit		
----	-------------------	---------	--	---------	--	--

PENGADILAN NEGERI MANNA

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	1 Unit	1 Unit			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1 Unit	1 Unit			
3.	Rumah Dinas Hakim	9 Unit	7 Unit	1 Unit	1 Unit	

PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	1 Unit	1 Unit			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1 Unit	1 Unit			
3.	Rumah Dinas Hakim	5 Unit	4 Unit	1 Unit		
4.	Rumah Dinas Panitera	1 Unit	1 Unit			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1 Unit	1 Unit			

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	-				Belum Ada
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	-				Belum Ada
3.	Rumah Dinas Hakim	-				Belum Ada
4.	Rumah Dinas Panitera	-				Belum Ada
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-				Belum Ada

PENGADILAN NEGERI TAIS

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	-				Belum Ada
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	-				Belum Ada
3.	Rumah Dinas Hakim	-				Belum Ada
4.	Rumah Dinas Panitera	-				Belum Ada
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-				Belum Ada

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	-	-			Belum Ada
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	-	-			Belum Ada
3.	Rumah Dinas Hakim	-				Belum Ada
4.	Rumah Dinas Panitera	-				Belum Ada
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-				Belum Ada

PENGADILAN NEGERI TUBEI

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√	-	-	-
2	Rumah Dinas Kasub	1	√	-	-	-

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	-				Belum Ada
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	-				Belum Ada
3.	Rumah Dinas Hakim	-				Belum Ada
4.	Rumah Dinas Panitera	-				Belum Ada

SARANA PRASARANA**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
I	Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	7	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
6	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
7	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
8	Ruang Sekretaris	1	
9	Ruang Kabag Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	

11	Ruang Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	
12	Ruang Kepegawaian dan TI	1	
13	Ruang Rencana Program dan Anggaran	1	
14	Ruang Sidang	2	
15	Ruang Kaukus	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Server	1	
18	Ruang Arsip	2	
19	Ruang Toilet	10	
20	Ruang Barang Bukti	1	
21	Ruang Genset	1	
22	Ruang Disabilitas	1	
23	Ruang Tunggu Jaksa	1	
24	Ruang Tunggu Mediasi	1	
25	Ruang Tunggu Terbuka	1	
II	Fasilitas Perkantoran		
1	Lemari Kayu	65	
2	Rak Besi	7	
3	Rak Kayu	1	
4	Filing Cabinet Besi	20	
5	Brandkas	2	
6	Tabung Pemadam Api	6	
7	CCTV	1	
8	Papan Visual/Papan Nama	2	
9	White Board	4	
10	Mesin Absensi	1	
11	LCD Projector/Infocus	2	
12	Perkakas Kantor Lainnya	3	
13	Alat Kantor Lainnya	2	
14	Meja Kerja Kayu	99	
15	Kursi Besi/Metal	272	
16	Kursi Kayu	6	
17	Sice	21	
18	Bangku Panjang Besi/Metal	6	
19	Meja Rapat	42	
20	Meja Komputer	13	
22	Tempat Tidur Besi	3	
23	Tempat Tidur Kayu	1	
24	Meja Resepsionis	2	
25	Meja Makan Kayu	1	
26	Kursi Fiber Glas/PLastik	16	
27	Partisi	2	
28	Mesin Pemotong Rumput	1	
29	Mesin Cuci	2	
30	Alat Pembersih Lainnya	8	
31	Lemari Es	2	
32	A.C Window	4	
33	A.C Split	41	
34	Kompas Gas (Alat dapur)	1	
35	Mixer	1	
36	Televisi	11	
37	Tape Recorder	2	

38	Amplifier	1	
39	Loudspeaker	18	
40	Sound System	1	
41	Wireless	1	
42	Microphone	3	
43	Stabilisator	10	
44	Dispenser	8	
45	Mimbar/Podium	1	
46	Lambang Instansi	1	
47	Gordyin/Kray	187	
48	Microphone/wireless MIC	1	
49	UPS	9	
50	Camera Digital	1	
51	Telephone (PABX)	1	
52	Pesawat Telephone	1	
53	Facsimile	1	
54	Genset	1	
55	Komputer Jaringan Lainnya	1	
56	P.C Unit	30	
57	Lap Top	28	
58	Monitor	1	
59	Printer	21	
60	Scanner	4	
61	External/Portable Hardisk	1	
62	Server	1	
63	Router	1	
64	Hub	1	
65	Box Sealing Dispenser	4	
66	Alat Tennis meja	1	

PENGADILAN NEGERI BENGKULU

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	3	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
9	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	-
10	Ruang Kepaniteraan PHI	1	-
11	Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan	1	-
12	Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala	1	-
13	Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan + Ruang Jurusita	1	-
14	Ruang Laktasi + Ruang Anak	1	-
15	Ruang Sidang	1	-
16	Ruang Sidang Tipikor	1	-

17	Ruang Sidang Anak	1	-
18	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1	-
19	Ruang Tunggu Tamu	2	-
20	Ruang Tunggu Terbuka	1	-
21	Ruang Posbakum	1	-
22	Ruang Tunggu Jaksa + Ruang Tahanan Wanita dan Anak + Ruang Tunggu Tahanan TIPIKOR	1	-
23	Ruang Tahanan Dewasa Pria	1	-
24	Ruang Perpustakaan	1	Gedung Lama
25	Ruang Arsip Perkara	1	Gedung Lama
26	Ruang Sidang PHI	1	Gedung PHI
27	Ruang Hakim PHI	1	Gedung PHI
28	Ruang Mediasi	1	-
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Lemari Penyimpanan	7	-
2	Lemari Kayu	15	-
3	Rak Besi	10	-
4	Filling Cabinet Besi	35	-
5	Brankas	2	-
6	CCTV	2	-
7	Mesin Absensi	1	-
8	LCD Projector Infocus	1	-
9	Layar LCD Projector	1	-
10	Alat Kantor Lainnya	1	-
11	Meja Kerja Kayu	62	-
12	Kursi Besi Metal	33	-
13	Kursi Kayu	28	-
14	Meja Rapat	1	-
15	Meja Resepsionis	1	-
16	Kursi Fiber glass / Plastik	44	-
17	Meubelair Lainnya	6	-
18	Alat pengukur Waktu Lainnya	4	-
19	AC Split	16	-
20	Kipas Angin	4	-
21	Loudspeaker	1	-
22	Soundsystem	1	-
23	Megaphone	2	-
24	Stabilisator	1	-
25	Dispenser	4	-
26	Mimbar / Podium	1	-
27	Palu Sidang	2	-
28	Lambang Instansi	1	-
29	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	-
30	Uninterruptible Power Supply (UPS)	15	-
31	Camera Digital	1	-
32	LCD Monitor	2	-

33	Telephone (PABX)	1	-
34	Facsimile	1	-
35	Genset	1	-
36	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	-
37	Local Area Network (LAN)	5	-
38	Tv monitor	2	-
39	PC Unit	20	-
40	Laptop	28	-
41	Printer (Peralatan Personal Computer)	29	-
42	Scanner (Peralatan Personal Computer)	4	-
43	Eksternal Portable Hardisk	3	-
44	Router	5	-
45	Server	2	-
46	Rak server	1	-

PENGADILAN NEGERI CURUP

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	2	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
9	Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan	1	-
10	Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala	1	-
11	Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-
12	Ruang Jurusita	1	-
13	Ruang Sidang	3	-
14	Ruang Sidang Anak	1	-
15	Ruang Teleconference	1	-
16	Ruang Tunggu	1	-
17	Ruang Tunggu Terbuka	1	-
18	Ruang Posbakum	1	-
19	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
20	Ruang Tunggu Terbuka	1	-
21	Ruang Tamu	2	-
22	Ruang Tahanan Dewasa Pria	1	-
23	Ruang Tahanan Dewasa wanita	1	-
24	Ruang Perpustakaan	1	-
25	Ruang Arsip	2	-
26	Ruang Laktasi	1	-

27	Ruang mediasi	1	-
II	Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer/PC	21	-
2	Laptop	14	-
3	Infocus	1	-
4	Monitor Jadwal Sidang	1	-
5	Air Conditioner Split	12	-
6	Faximile	2	-
7	Genset	1	-
8	Mesin Fingerprint (Absen)	1	-
9	Server	2	-
10	CCTV	10	-
11	Jaringan Hotspot/Internet	1	-
12	Camera Digital	1	-
13	Printer	27	-
14	Kipas Angin	2	-
15	Televisi	2	-
16	Sound System	2	-
17	UPS	15	-
18	Telepon (PABX)	1	-
19	Pesawat Telepon	1	-
20	Bangku Panjang Besi	28	-
21	Bangku Panjang Kayu	16	-
22	Meja Rapat	2	-
23	Meja Komputer	4	-
24	Meja Receptionis	1	-
25	Lambang Garuda	8	-
26	Tiang Bendera	2	-
27	Lambang Instansi	1	-
28	Sice	8	-
29	Kursi Kayu	41	-
30	Kursi Besi	72	-
31	Meja Kerja Kayu	89	-
32	Brandkas	2	-
33	Filling Kabinet Besi	7	-
34	Filling Kabiner Kayu	3	-
35	Rak Besi	3	-
36	Rak Kayu	4	-
37	Lemari Kayu	42	-
38	Scanner (Universal Tester)	9	-
39	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	-
40	Papan Visual	12	-
41	Perkakas kantor lainnya	2	-
42	Alat kantor lainnya	4	-

43	Slide proyektor	1	-
43	Router/Mikrotik	1	-
44	Rak Server	1	-
45	Peralatan jaringan lainnya	1	-

PENGADILAN NEGERI MANNA

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	1	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
9	Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan	1	-
10	Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala	1	-
11	Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-
12	Ruang Jurusita	1	-
13	Ruang Sidang	3	-
14	Ruang Sidang Anak	1	-
15	Ruang Panitera Pengganti	1	-
16	Ruang Tunggu Sidang	1	-
17	Ruang Tunggu Terbuka	1	-
18	Ruang Posbakum	1	-
19	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
20	Ruang Tunggu Penasehat Hukum	1	-
21	Ruang Tamu	2	-
22	Ruang Tahanan Dewasa Pria	1	-
23	Ruang Tahanan Dewasa wanita	1	-
24	Ruang Perpustakaan	1	-
II	Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer	26	-
2	laptop	15	-

3	infocus	2	-
4	Switch	1	
5	Scanner	2	
6	faximile	1	-
7	Genset	1	-
8	Mesin Fingerprint (Absen)	2	
9	Server	3	
10	Jaringan Hotspot	4	

PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1 Unit	
2.	Ruang Wakil Ketua	1 Unit	
3.	Ruang Hakim	1 Unit	
4.	Ruang Panitera	1 Unit	
5.	Ruang Sekretaris	1 Unit	
6.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1 Unit	
7.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1 Unit	
8.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1 Unit	
9.	Ruang Panitera Pengganti	1 Unit	
10.	Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Unit	
11.	Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan	1 Unit	
12.	Ruang Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Unit	
13.	Ruang Sidang	4 Unit	• Ruang Sidang Candra • Ruang Sidang Kartika • Ruang Sidang Cakra • Ruang Sidang Anak
14.	Ruang Tahanan	3 Unit	
15.	Ruang Server	1 Unit	
16.	Ruang Arsip	2 Unit	
17.	Ruang Tunggu Khusus Anak	1 Unit	
18.	Ruang Mediasi dan Diversi	1 Unit	
19.	Ruang BAPAS	1 Unit	
20.	Ruang Jaksa	1 Unit	
21.	Ruang Posyankum	1 Unit	
22.	Ruang Kesehatan dan Laktasi	1 Unit	
23.	Ruang Perpustakaan	1 Unit	
24.	Ruang Tamu Terbuka	3 Unit	
25.	Ruang Tunggu	2 Unit	
26.	Mushola	1 Unit	
27.	Ruang Parkir	5 Unit	
28.	Pos jaga	1 Unit	

No.	Nama Barang	Kondisi Barang		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Jumlah Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	9.192	0	0
2	Jumlah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.620	0	0
3	Jumlah Tanah Bangunan Balai Sidang/pertemuan	2.393	0	0
4	Jumlah Station Wagon	1	1	0
5	Jumlah Sepeda Motor	5	0	3
6	Jumlah Sepeda	0	0	1
7	Jumlah Lemari Besi/metal	0	0	3
8	Jumlah Lemari Kayu	32	36	24
9	Jumlah Rak Besi	25	0	0
10	Jumlah Filing Cabinet Besi	5	0	4
11	Jumlah Brandkas	1	0	0
12	Jumlah Cctv - Camera Control Television System	1	0	0
13	Jumlah Papan Pengumuman	14	0	7
14	Jumlah Meja Kerja Kayu	60	17	20
15	Jumlah Kursi Besi/metal	36	13	61
16	Jumlah Kursi Kayu	32	49	4
17	Jumlah Sice	5	16	0
18	Jumlah Bangku Panjang Kayu	24	20	1
19	Jumlah Meja Rapat	2	0	0
20	Jumlah Meja Komputer	16	0	15
21	Jumlah Tempat Tidur Kayu	2	0	0
22	Jumlah Meja Resepsionis	1	0	3
23	Jumlah Sketsel	1	0	0
24	Jumlah Meja Makan Kayu	1	8	0
25	Jumlah Kursi Fiber Glas/plastik	60	1	102
26	Jumlah Jam Elektronik	0	0	2
27	Jumlah Mesin Pemotong Rumput	3	0	0
28	Jumlah Mesin Cuci	0	1	0
29	Jumlah Alat Pembersih Lainnya	1	0	0
30	Jumlah Lemari Es	1	8	0
31	Jumlah A.c. Split	15	6	5
32	Jumlah Portable Air Conditioner (alat Pendingin)	0	3	10
33	Jumlah Kipas Angin	4	0	3
34	Jumlah Kompor Gas (alat Dapur)	0	9	0
35	Jumlah Televisi	8	3	1
36	Jumlah Video Cassette	0	0	1
37	Jumlah Tape Recorder (alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	0	2
38	Jumlah Equalizer	0	2	0
39	Jumlah Loudspeaker	0	1	4

40	Jumlah Sound System	1	1	2
41	Jumlah Karaoke	0	0	1
42	Jumlah Microphone	7	5	3
43	Jumlah Unit Power Supply	2	0	0
44	Jumlah Stabilisator	0	1	2
45	Jumlah Lambang Garuda Pancasila	8	0	4
46	Jumlah Tiang Bendera	2	0	0
47	Jumlah Kaca Hias	18	0	0
48	Jumlah Dispenser	9	0	0
49	Jumlah Palu Sidang	4	0	0
50	Jumlah Lambang Instansi	1	0	0
51	Jumlah Gordyin/kray	0	1	7
52	Jumlah Asbak Tinggi	0	8	0
53	Jumlah Dvd Player	2	0	0
54	Jumlah Home Theater	0	9	0
55	Jumlah Uninterruptible Power Supply (ups)	0	0	1
56	Jumlah Digital Led Running Text	1	0	0
57	Jumlah Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	0	1	0
58	Jumlah Camera Digital	1	2	0
59	Jumlah Lcd Monitor	3	2	0
60	Jumlah Telephone (pabx)	1	0	1
61	Jumlah Pesawat Telephone	15	0	12
62	Jumlah Handy Talky (ht)	4	0	0
63	Jumlah Facsimile	2	0	2
64	Jumlah Peralatan Antena Shf/parabola Lainnya	0	1	0
65	Jumlah Genset	1	0	0
66	Jumlah Automatic Message Switching Center (amsc)	1	0	0
67	Jumlah Stabilizer	0	0	22
68	Jumlah Alat Pemadam Kebakaran	6	0	0
69	Jumlah Serial Scanner/printer	1	0	0
70	Jumlah Uninterrupted Power Supply (ups)	2	0	17
71	Jumlah Barcode Reader	1	0	0
72	Jumlah Layar Proyektor	1	0	0
73	Jumlah Stovol	3	0	12
74	Jumlah Komputer Jaringan Lainnya	1	0	0
75	Jumlah P.c Unit	5	7	19
76	Jumlah Note Book	18	2	6
77	Jumlah Printer (peralatan Personal Komputer)	26	3	9
78	Jumlah Scanner (peralatan Personal Komputer)	5	2	0
79	Jumlah Server	3	0	1
80	Jumlah Router	1	0	0
81	Jumlah Hub	1	0	0
82	Jumlah Air Conditioning (ac)	3	1	2

83	Jumlah Alat Tennis Meja	0	1	0
84	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	0	0
85	Jumlah Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	0	0
86	Jumlah Gedung Garasi/pool Semi Permanen	1	3	0
87	Jumlah Bangunan Tempat Sidang/zitting Plaat	1	1	0
88	Jumlah Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	0	9	0
89	Jumlah Pagar Permanen	2	0	0
90	Jumlah Monografi	27	0	0
91	Jumlah Piala	0	11	13
92	Jumlah Software Komputer	3	0	0

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
I	Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	3	
7.	Ruang Kepaniteraan	3	
8.	Ruang Kesekretariatan	3	
9.	Ruang Posbakum	1	
8.	Ruang Mediasi	1	
9.	Ruang Ibu Menyusui	1	
10.	Ruang Rapat	1	
11.	Ruang IT	1	
12.	Ruang Arsip	1	
13.	Ruang Tunggu Penasihat Hukum	1	
14.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
15.	Ruang Tahanan	2	
16.	Ruang Tunggu Tahanan Anak	1	
17.	Ruang Perpustakaan	1	
18.	Dapur	1	
19.	Tempat Ibadah / Musholla	1	
20.	Toilet	8	
21.	Ruang Tamu Terbuka	1	
II	Fasilitas Perkantoran		
1.	Komputer PC	19 Unit	
2.	Laptop	7 Unit	

3.	Printer	10 Unit	
4.	Scanner	2 Unit	
5.	Fax	1 Unit	
6.	AC (Air Conditioner)	13 Uni	
7.	Genset	2 Unit	
8.	CCTV	16 Titik Camera	
9	Lemari Kayu	34 Buah	
10.	Meja kerja kayu	56 Buah	
11.	Filing Cabinet Besi	3 Buah	
12	Rak Besi	14 Buah	
13	Brankas	2 Buah	
14	Papan Nama	27 Buah	
15	Kota Surat	60 Buah	
16	Teralis	1 Buah	
17	Kursi Besi/Metal	94 Buah	
18	Sice	6 buah	
19	Kursi kayu	50 buah	
20	Bangku Panjang Besi/ Metal	6 buah	
21	Meja Rapat	1 buah	
22	Meja komputer	8 buah	
23	Televisi	2 buah	
24	Hub	5 buah	
25	Router	1 Buah	
26	Modem	1 buah	
27	Sound system	1 buah	
28	Finger Print	1 buah	
29	Lambang Garuda	3 buah	

PENGADILAN NEGERI TAIS

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	1	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
9	Ruang Sub Bag Umum ,Keuangan dan	1	-
10	Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala	1	-

11	Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-
12	Ruang Jurusita		-
13	Ruang Sidang	2	-
14	Ruang Sidang Anak	1	-
15	Ruang Teleconference	1	-
16	Ruang Tunggu Atas	1	-
17	Ruang Tunggu Terbuka Bawah	1	-
18	Ruang Posbakum	1	-
19	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
20	Ruang Tunggu Terbuka	1	-
21	Ruang Tamu	2	-
22	Ruang Tahanan Dewasa Pria	1	-
23	Ruang Tahanan Dewasa wanita	1	-
24	Ruang Perpustakaan	1	-
25	Ruang TAPM	1	
26	Ruang Bapas	1	
27	Ruang Gudang	1	
28	Rumah genset	1	

	Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor					
01	Mesin Ketik Manual	4				
02	Lemari Kayu	32				
03	Rak Kayu	24				
04	Filling Cabinet Besi	6	2 Rusak Ringan 4 rusak berat			
05	Brandkas	2				
06	Tabung Pemadam Api	4				
07	CCTV	16				
08	Papan Visual /Papan Nama	41				
09	Mesin Absensi	1				
10	Meja Kerja Kayu	44				
11	Kursi Besi/Metal	145	123 Baik 6 rusak berat			
12	Kursi Kayu	50				
13	Sice	3				
14	Meja Rapat	2				
15	Meja Komputer	2				
16	Meja Resepsionis	1				
17	Partisi	2				
18	Vacuum Cleaner	1				
19	Mesin Pemotong Rumput	1				
20	AC Split	27	21 Baik 6 rusak berat			
21	Televisi	7				
22	Sound System	1				
23	Lambang Garuda Pancasila	2				
24	Tiang Bendera	2				
25	Lambang Isntansi	1				
26	Karpet	2				
27	Gordyn/Kray	1				
28	UPS	17	5 Baik 11 Rusak berat			

29	Layar Film/Projector	1				
30	Telephone (PABX)	24				
31	Facsimile	1				
32	Genset	1				
33	Sprayer	1				
34	UPS	2	2 Rusak berat			
35	Internet	1				
36	PC Unit	14	11 Baik 3 Rusak berat			
37	Personal Komputer lainnya	7	7 Rusak berat			
38	Kursi zers	1				
39	Laptop	11	9 Baik 2 Rusak berat			
40	Komputer Jaringan lain	1				
41	Printer	22	13 Baik 9 rusak berat			
42	Server	2				
43	Router	1				
44	Rak server	1				

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
6	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
7	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
8	Ruang Sekretaris	1	
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
12	Ruang Sidang	3	
13	Ruang Mediasi dan Diversi	1	
14	Ruang Kaukus	1	
15	Ruang Penjara	2	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Tunggu Anak	1	
18	Ruang Perpustakaan	1	
19	Ruang Server	1	
20	Ruang Arsip	2	
21	Ruang Toilet	10	
22	Ruang Barang Bukti	1	
23	Ruang Genset	1	
24	Ruang Disabilitas	1	
25	Ruang Tunggu Jaksa	1	
26	Ruang Tunggu Mediasi	1	
27	Ruang Tunggu Terbuka	1	

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
II	Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer	26	
2	Printer	23	
3	Scanner	5	
4	Laptop	9	
5	Mini Computer	1	
6	PABX	1	
7	Air Conditioner	15	
8	Brankas	2	
9	Faximile	1	
10	Finger Print	1	
11	Server	2	
12	Router	1	
13	Hub	1	
14	Camera Digital	1	
15	TV	2	
16	CCTV	16	
17	Genset	1	
18	Lambang Instansi	1	
19	Lemari Kayu	32	
20	Rak Kayu	8	
21	Publik Astari	2	
22	Meja Kerja Kayu	33	
23	Meja Rapat	1	
24	Meja Resepsionis	2	
25	Sice	6	
26	Kursi Besi/Metal	72	
27	Kursi Zeis	10	
28	Kursi Kayu	23	

PENGADILAN NEGERI TUBEI

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	1	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
9	Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan	1	-
10	Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala	1	-
11	Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-

12	Ruang Jurusita Pengganti	1	-
13	Ruang Sidang	2	-
14	Ruang Sidang Anak	1	-
15	Ruang Arsip	1	-
16	Ruang Tunggu	1	-
17	Ruang Tunggu Terbuka	1	-
18	Ruang Posbakum	1	-
19	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
20	Ruang Tunggu Terbuka	1	-
21	Ruang Tamu	2	-
22	Ruang Tahanan Dewasa Pria	1	-
23	Ruang Tahanan Dewasa wanita	1	-
24	Ruang Perpustakaan	1	-
II	Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer	10	-
2	laptop	10	-
3	infocus	1	-
4	Monitor Jadwal Sidang	-	-
5	Air Conditioner	5	-
6	faximile	1	-
7	Genset	1	-

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Sarana / Prasarana Gedung Perkantoran	18	
1.	Ruang Ketua	1	Bangunan Kantor Masih Pinjam Pakai gedung Bangunan Balai Benih Holtikultura milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Panitera Muda	1	
7.	Ruang Kesekretariatan	1	
8.	Ruang PTSP	1	
9.	Ruang Tunggu Tamu	1	
10.	Toilet Ruang Wakil Ketua	1	
11.	Toilet Ruang Kepaniteraan	1	
12.	Toilet Ruang Kesekretariatan	1	
13.	Toilet Pengunjung	2	

14.	Ruang Sidang Biasa		1			
15.	Ruang Tahanan		1			
16.	Ruang Tunggu Pengunjung		2			
II	Sarana / Prasarana / Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Lemari Kayu	10	10	0	0	
2.	Mesin Absensi	1	1	0	0	
3.	Meja Kerja Kayu	20	20	0	0	
4.	Kursi Fiber Glas/plastik	39	37	0	2	
5.	AC Split	6	6	0	0	
6.	Televisi	1	1	0	0	
7.	UPS	5	5	0	0	
8.	LCD Monitor	1	1	0	0	
9.	Change Over Switch	1	1	0	0	
10	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	0	0	
11.	PC	8	8	0	0	
12.	LAPTOP	5	5	0	0	
13.	Printer	4	4	0	0	
14.	Server	2	2	0	0	
15.	Router	10	10	0	0	
16.	Hub	2	2	0	0	
17.	Rackmount	1	1	0	0	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Administrasi di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Adapun beberapa sistem administrasi yang memerlukan dukungan Teknologi informasi yang telah diterapkan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain :

1. Perangkat Keras

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan pengadaan perangkat keras berupa Server, Laptop, Komputer PC, Printer, Scanner dan UPS untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkara.

2. Perangkat Lunak

Untuk mendukung administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan Pengadilan tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri dibawahnya telah menerapkan :

1. Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan semua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menggunakan Aplikasi Komdanas.

2. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang digunakan bagian kepegawaian dalam proses peremajaan data telah diterapkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan semua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.
3. Aplikasi SIMAK-BMN yang digunakan dalam pengelolaan aset-aset negara telah digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dan semua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Bagian Keuangan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu juga telah menggunakan berbagai aplikasi, diantaranya : SAIBA, SAS, GPP, E-Rekon dan MONEV SMART.

IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Selain itu untuk, untuk Pelaksanaan Administrasi secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang sering dikenal dengan e-Court juga telah diterapkan di semua Pengadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran perkara gugatan/permohonan secara *online*(*e-Filling*), pembayaran biaya perkara secara *online* (*e-Payment*) dan pemanggilan pihak secara *online*(*e-Summons*).

Merupakan aplikasi dari Mahkamah Agung yakni aplikasi administrasi perkara secara online. Ini merupakan kelanjutan dari PERMA No. 3 Th. 2018 tentang administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Disini telah memberikan payung hukum penggunaan aplikasi e-Court. Dengan tiga fitur utamanya yang bersifat elektronik, yaitu :

1. **E-Filling**, yaitu Pendaftaran Perkara.
2. **E-Payment**, yaitu pembayaran panjar uang perkara, dan
3. **E-Summons**, yaitu penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan.

Untuk keadaan perkara Perdata yang sudah menggunakan aplikasi *e-Court* pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara yang Menggunakan Aplikasi <i>e-Court</i>
I.	Pengadilan Negeri Bengkulu	
1.	Perdata Gugatan	25
2.	Perdata Permohonan	5
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1
III.	Pengadilan Negeri Curup	
1.	Perdata Gugatan	-

2.	Perdata Permohonan	11
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-
IV.	Pengadilan Negeri Manna	
1.	Perdata Gugatan	1
2.	Perdata Permohonan	6
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1
V.	Pengadilan Negeri Argamakmur	
1.	Perdata Gugatan	2
2.	Perdata Permohonan	-
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-
VI.	Pengadilan Negeri Bintuhan	
1.	Perdata Gugatan	1
2.	Perdata Permohonan	-
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-
VII.	Pengadilan Negeri Tais	
1.	Perdata Gugatan	-
2.	Perdata Permohonan	-
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1
VIII.	Pengadilan Negeri Kepahiang	
1.	Perdata Gugatan	-
2.	Perdata Permohonan	2
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-
IX.	Pengadilan Negeri Tubei	
1.	Perdata Gugatan	1
2.	Perdata Permohonan	1
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-
X.	Pengadilan Negeri Mukomuko	
1.	Perdata Gugatan	-
2.	Perdata Permohonan	-
3.	Perdata Gugatan Sederhana	-

IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Mahkamah Agung merupakan Lembaga publik dalam sistem peradilan Indonesia yang berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik / Masyarakat, hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035.

Untuk menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir. Oleh karena itu, Pengadilan melakukan optimalisasi teknologi informasi (TI) dalam memberikan pelayanan publik/masyarakat dengan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Pada tahun 2019 Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.3.0-1.

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)”.

Maka pada tahun 2019 Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu juga telah sepenuhnya mengimplementasikan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sehingga dalam memonitoring jalannya implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau ketertiban dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Curup dapat berjalan dengan optimal.

NO	NAMA SATKER	VERSI SIPP	KETERANGAN
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	3.3.0-1	sipp.pn-bengkulu.go.id
2.	Pengadilan Negeri Curup	3.3.0-1	sipp.pn-curup.go.id
3.	Pengadilan Negeri Manna	3.3.0-1	sipp.pn-manna.go.id
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	3.3.0-1	sipp.pn-argamakmur.go.id
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	3.3.0-1	sipp.pn-bintuhan.go.id
6.	Pengadilan Negeri Tais	3.3.0-1	sipp.pn-tais.go.id
7.	Pengadilan Negeri Kepahiang	3.3.0-1	sipp.pn-kepahiang.go.id
8.	Pengadilan Negeri Tubei	3.3.0-1	sipp.pn-tubei.go.id
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	3.3.0-1	sipp.pn-mukomuko.go.id

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

AKREDITASI PENJAMIN MUTU

Pengadilan Tinggi Bengkulu beserta Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkannya, pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu beserta Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah ikut serta dalam penilaian atau Akreditasi Penjaminan Mutu. Banyak perbaikan yang dilakukan secara bertahap untuk mensukseskan Akreditasi tersebut. Adapun Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul /Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE).

Berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 30 Oktober 2019 didapat hasil sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	AKREDITASI
1.	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	A
2.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	B
3.	PENGADILAN NEGERI CURUP	A
4.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	A
5.	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	A
6.	PENGADILAN NEGERI MANNA	B
7.	PENGADILAN NEGERI TAIS	A
8.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	A
9.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	A

PENGHARGAAN LAINNYA

Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapat Penghargaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. H. Prim Haryadi, SH., MH sebagai UAPPA -W **TERBAIK** untuk kategori yg sangat bergengsi yakni kategori " Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Tahunan yg BERKUALITAS". Penghargaan tersebut diterima oleh Operator SAIBA-W PT

Bengkulu ibu Sesti Sapitri, SE dan Operator SIMAK BMN-W ibu Pelangi Wijaya, SE di Eastparch Hotel Yogyakarta.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pada Tahun 2019, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah diberlakukan di Seluruh Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan menyediakan meja pelayanan untuk layanan dibidang Umum, di bidang Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.



PTSP PT Bengkulu



PTSP PN Curup



PTSP PN Argamakmur



PTSP PN Kepahiang



PTSP PN Tais



PTSP PN Bintuhan



PTSP PN Tubei



PTSP PN Mukomuko

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

- PENGADILAN NEGERI CURUP

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di amanatkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Curup Tahun 2019 telah menyediakan layanan berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp* yang bersifat inovatif antara lain :

1. *Whatsapp* Pengaduan Anti-Gratifikasi.

Layanan ini merupakan layanan yang dapat mendukung mewujudkan Pengadilan Negeri Curup untuk berperilaku bersih dalam menjalankan tugas dengan cara melaporkan jika ada peminta gratifikasi dalam bentuk apapun ketika menggunakan layanan peradilan di

Pengadilan Negeri Curup, baik yang dilakukan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti maupun Jurusita dan/atau seluruh warga Pengadilan Negeri Curup melalui handphone android/IOS ke nomor yang sudah ditetapkan.

 Wa' Afika (WhatsApp Pengaduan Anti-Gratifikasi) Layanan Pengaduan Anti Gratifikasi PENGADILAN NEGERI CURUP 2019	Wa' Afika adalah layanan pengaduan Anti-Gratifikasi Berbasis Aplikasi WhatsApp Messenger. Dasar hukum pembuatan layanan pengadilan Anti-Gratifikasi Berbasis Aplikasi WhatsApp Messenger (Wa' Afika) adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 17 Tahun 2018 Tentang Himbauan Pembuatan Aplikasi Peningkatan Perilaku Anti Gratifikasi. Bapak/Ibu Pengguna Layanan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Curup, tidak perlu kami untuk berpetaka besila dalam menjalankan	tugas dengan cara melaporkan kepada kami bila ada perilaku gratifikasi dalam bentuk apapun ketika menggunakan layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Curup, baik yang dilakukan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti maupun Jurusita dan/atau seluruh warga Pengadilan Negeri Curup. Bapak/Ibu Pengguna Layanan Pengaduan dapat melakukan / melaporkan hal tersebut cukup melalui Handphone Android/IOS Bapak / Ibu melalui :  052385871997 / Wa' Afika Kami akan langsung merespon pengaduan laporan Bapak/Ibu atas perilaku gratifikasi atas aparatur Pengadilan Negeri Curup. 
--	--	--

2. Whatsapp Informasi Denda e-Tilang.

Layanan ini merupakan layanan informasi yang dapat mempermudah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan khususnya para pelanggar tilang, sehingga tidak perlu lagi mendatangi papan informasi dikantor Pengadilan Negeri Curup untuk melihat besaran denda tilang yang sudah diputusi oleh Hakim tilang Pengadilan Negeri Curup.

 Wa' ETT (WhatsApp e-Tilang) Inovasi Layanan Informasi Denda e-Tilang Pengadilan Negeri Curup 2019	Wa' ETT adalah Layanan Informasi besaran denda tilang melalui chat via aplikasi WhatsApp Messenger. Layanan ini merupakan layanan dan inovasi dari Pengadilan Negeri Curup dalam rangka mempermudah dan memberikan layanan terbaik bagi para pencari keadilan khususnya para pelanggar tilang. Bapak/Ibu Pelanggar tilang tidak perlu lagi mendatangi Papan Informasi dikantor Pengadilan untuk melihat besaran denda tilang yang sudah diputus oleh Hakim Tilang Pengadilan Negeri Curup.	cukup chat Wa' ETT untuk mengetahui besaran denda tilang dengan cara : - Kirim Pesan : info@tilang@nomorseriblangkotilang atau - Kirim foto blangko tilang. Kirim ke nomornya Wa' ETT  082385872002 Bapak/Ibu pelanggar tilang akan mendapat besaran chat mengenai besaran denda tilang, setelah tahu besarnya denda yang harus dibayar. Bapak/Ibu pelanggar tilang langsung mendatangi Kejaksaan Negeri Bayang lebong untuk bayar denda, sekaligus menobus barang bukti.
--	--	--

- **PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR**

- Aplikasi Layar Kepegawaian

Aplikasi ini akan menampilkan data urut kepangkatan, daftar cuti, daftar senioritas, dan kenaikan pangkat pada layar kepegawaian sehingga akan menghemat penggunaan papan informasi kepegawaian.



- Aplikasi Survey Harian

Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah proses survey harian kepada masyarakat yang ada di Pengadilan Negeri Arga Makmur, aplikasi ini menggunakan device layar sentuh sehingga masyarakat tinggal menekan pilihan yang ada pada layar yaitu sangat puas, puas dan tidak puas, apapun pilihannya akan tersimpan pada database yang kemudian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas yang ada di Pengadilan Negeri Arga Makmur.



- Aplikasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pembuatan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan datanya di simpan dalam database dan dapat dicetak kapan saja.

HASIL PERHITUNGAN SURVEY INDEKS KEPUKSIAN KEPILIKAN MARYAMKAT
2018-09-01 SAMPAI 2019-07-31

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
9	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
10	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
11	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
12	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
13	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
14	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
15	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

- Aplikasi Indeks Persepsi Korupsi

Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pembuatan laporan Indeks Persepsi Korupsi dan datanya di simpan dalam database dan dapat dicetak kapan saja.

HASIL PERHITUNGAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
2018-09-01 SAMPAI 2019-07-31

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
9	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
10	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
11	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
12	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
13	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
14	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
15	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari lampiran ke IV SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Surat Keputusan tersebut di atas pada prinsipnya merupakan realisasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan yang diantaranya telah menetapkan bahwa Informasi mekanisme penanganan pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai adalah merupakan jenis informasi yang harus diumumkan.

Keberadaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 juga merupakan pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Mahkamah Agung dalam penanganan pengaduan, dengan harapan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, bersinergi dengan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

PENGAWASAN KE DAERAH

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8-U/1428/Kp.04.6/07/2019 tanggal 03 Juli 2019 telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga Peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH PENGAWASAN
1.	Dr. Siswandriyono, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2.	Nursiah Sianipar, S.H. Tursinah Aftianti, S.H., M.H. Eni Indriyartini, S.H., M.H. Sophar Sitorus, S.H. Sudirman Sitepu, S.H.	Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Ad Hoc Hakim Ad Hoc	PN Bengkulu

3.	Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. Sukmayanti, S.H., M.H. Bahtra Yenni Warita, S.H.	Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi	PN Curup
4.	Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H Loise Betti Silitonga, S.H., M.H Wiwik Suhartono, S.H., M.H	Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi	PN Manna
5.	Ratna Mintarsih, S.H., M.H Achmad Dimyati R.S, S.H., M.H Lince Anna Purba, S.H., M.H	Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi	PN Arga Makmur
6.	M. Jalili Sairin S.H., M.H. Winarto, S.H. Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H	Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi	PN Tais
7.	Iman Gulton, S.H., M.H. Arini, S.H	Hakim Tinggi Hakim Tinggi	PN Kepahiang
8.	Marlianis, S.H., M.H. Marulak Purba, S.H., M.H	Hakim Tinggi Hakim Tinggi	PN Bintuhan
9.	Lidya Sasando Parapat, S.H. M.H. DR. Baslin Sinaga, S.H., M.H	Hakim Tinggi Hakim Tinggi	PN Tubei
10.	A. Dachrowi SA. S.H., M.H. Ida Marion, S.H., M.H	Hakim Tinggi Hakim Tinggi	PN Mukomuko

PENGAWASAN REGULER

Selama tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melakukan pengawasan rutin ke daerah-daerah/Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh Hakim Pengawas Daerah beserta Tim guna memantau pelaksanaan peradilan di pengadilan negeri setiap pengawasan menghasilkan laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku koordinator Pengawasan.

PENGAWASAN MELEKAT

1. Pengertian :

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan **secara efektif dan efisien** sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Maksud Pengawasan :

- Memperoleh informasi, apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan;
- Menilai kinerja aparat Pengadilan;

3. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik.

4. Ruang lingkup Pengawasan :

- a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan financial pengadilan ;
- b. Sasaran Pengawasan :
 - Aparat **Pengadilan Tinggi**
 - Aparat **Pengadilan Negeri**

5. Bentuk Pengawasan :

- a. Pengawasan Langsung : dengan cara pemeriksaan reguler, dan pemeriksaan khusus.
- b. Pengawasan Tidak Langsung : dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan, dan pemberitaan media massa.

6. Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Bengkulu :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kesekretariatan yang meliputi administrasi Kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
- c. Pengawasan terhadap perilaku Aparat Pengadilan.
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayan publik.

Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi**I. Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi terhadap :****1. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi :**

- a. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan jajaran Pengadilan Tinggi Bengkulu dan pengadilan se-Kota Bengkulu;
- b. Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
- c. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas Hakim-Hakim, Kepaniteraan dan Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan se-Kota Bengkulu;

2. Hakim Tinggi, Hakim Tinggi AD-HOC, dan Hakim Tinggi Pengawas :

- a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana :
 - Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan;
 - Penyelesaian/minutasi perkara;
 - Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat;
- b. Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata :
 - Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992 ;
 - Penyelesaian perkara sesuai SOP;
- c. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Perdata;

3. Panitera

- a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
- b. Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi umum;

4. Sekretaris

Memantau pelaksanaan Program Kerja, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban DIPA;

5. Pengadilan Negeri se-Wilayah Bengkulu.

- a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana :
 - Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan ;
 - Penyelesaian/minutasi perkara;
 - Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat;
- b. Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata :
 - Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992;
 - Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP;
- c. Memantau kegiatan Hakim;
- d. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan S.O.P ;

II. Pengawasan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi :

- a. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris dan Jajarannya pada Pengadilan Tinggi Bengkulu serta Hakim, Panitera/Sekretaris beserta jajarannya pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- b. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata;
- c. Memantau tingkah laku Aparat Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu;

- d. Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Tinggi dan memantau pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri se-Kota Bengkulu berdasarkan SK KMA No.076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009;
- e. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum;

III. Pengawasan oleh Wakil Ketua terhadap :

1. Panitera

- a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
- b. Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara;
- c. Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala;
- d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, dan Panitera Pengganti;
- e. Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan perkara setiap bulannya;

2. Sekretaris

- a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP;
- b. Memantau pelaksanaan DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se- Kota Bengkulu;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai Kuasa pengguna Anggaran
- d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian;
- e. Memantau pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan keamanan kantor;

IV. Pengawasan oleh Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum, Pidana Khusus dan Panitera Pengganti :

- 1. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Muda di Kepaniteraan sesuai dengan pola BINDALMIN dan SOP;
- 2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana, PaniteraMuda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf;
- 3. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda;
- 4. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Panitera Muda;
- 5. Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;

V. Pengawasan oleh Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan & Pelaporan, Rencana Program dan Anggaran dan Kepegawaian & Teknologi Informasi.

- 1. Pelaksanaan tugas-tugas di Kesekretariatan sesuai dengan Pola BINDALMIN dan SOP;
- 2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh KaSubBag TU & RT,

KaSubBag Keuangan & Pelaporan, Kasubbag Renprog & Anggaran dan KaSubBag Kepegawaian & TI terhadap kinerja staf;

3. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke Mahkamah Agung RI dan instansi terkait;
4. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya;
5. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kepala Sub. Bagian;
6. Pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor;

VI. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf :

1. Panitera Muda Pidana :

- a. Pelaksanaan registrasi perkara;
- b. Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan, dan pembantaran penahanan;
- c. Pembuatan konsep-konsep penetapan dan pengirimann penetapan;
- d. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis;
- e. Pelaksanaan pemberkasan perkara;
- f. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan negeri;
- g. Penyerahan berkas perkara banding untuk diarsipkan;
- h. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana;
- i. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

2. Panitera Muda Perdata :

- a. Pelaksanaan registrasi perkara;
- b. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis;
- c. Pelaksanaan pemberkasan perkara;
- d. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri;
- e. Penyerahan berkas perkara banding untuk diarsipkan;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara;
- g. Penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima;
- h. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata;
- i. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

3. Panitera Muda Hukum

- a. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata;
- b. Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Mahkamah Agung RI;
- c. Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata;
- d. Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

VII. Pengawasan oleh para Kepala Sub Bagian terhadap Staf:**1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga:**

- a. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
- b. Pencatatan barang persediaan;
- c. Pencatatan permintaan barang persediaan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN);
- e. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);
- f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar;
- g. Pengiriman surat-surat keluar;
- h. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri;
- i. Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan;
- j. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- k. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor;
- l. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor, dan petugas piket harian;
- m. Pembuatan konsep-konsep laporan;
- n. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi :

- a. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk;
- b. Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian;
- c. Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan PNS, mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiun, usulan Satya Lencana, pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis, hukuman disiplin, pembuatan konsep-konsep surat keputusan, surat tugas, dan lain-lain;
- d. Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai;
- e. Pelaksanaan penerimaan Calon Hakim dan Calon PNS;
- f. Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan, serta prosesi purnabakti Hakim Tinggi

dan Ketua Pengadilan Negeri;

- g. Pembuatan konsep-konsep laporan;
- h. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

3. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

- a. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran;
- b. Pelaksanaan penyetoran pajak;
- c. Pelaksanaan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

1. Sub Bag Rencana Program dan Anggaran :

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran /RKAKL
- b. Pelaksanaan Revisi DIPA
- c. Pelaksanaan Laporan Tahunan
- d. Pelaksanaan LKJIP
- e. Penyusunan Renstra
- f. Penyusunan IKU
- g. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pembuatan Kontrak Kinerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efisien.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, perlu dibuat kontrak kinerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara :

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Hakim Tinggi dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
3. Penitera dengan Ketua Pengadilan Tinggi;
4. Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Tinggi
5. Penitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera;
6. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dengan Sekretaris;
7. Panitera Pengganti dengan Panitera
8. Staff Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum;
9. Staff Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian; dan Kepala Sub Bag Rencana Program dan Anggaran
10. Hakim Pengadilan Negeri se-Kota Bengkulu dengan Hakim Tinggi Pengawas Daerah;

SANKSI

Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa:

1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan perkara, pembagian perkara untuk bulan berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap SKP
2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian minutasikurangi pembagian perkaranya berpengaruh terhadap SKP serta dapat diusulkan untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Panitera Pengganti;
3. Pegawai/staff yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diperintahkan oleh atasan langsungnya berpengaruh terhadap SKP serta dapat diusulkan penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penghentian tunjangan remunerasi;
4. Hukuman disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas daerah pada Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu baik dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja peradilan dan kualitas pelayanan public dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja baru dengan cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas di masa mendatang.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Tahunan Tahun 2019 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kami diantaranya ialah :

- a. Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada Wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- b. Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- c. Manajemen dan pengelolaan perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2019 ini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi kami di tahun 2020 nanti mengingat kami terus menerus berupaya untuk dapat menyelesaikan tiap-tiap perkara yang masuk secara *one day minute, one day service dan one day publish*.
- d. Pengawasan Internal pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu dilakukan mengingat wilayah Bengkulu berada pada zona merah, dengan terus menerus memberikan pembinaan kepada seluruh Pegawai baik di Tingkat Banding maupun di Tingkat Pertama.
- e. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2019 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan mengikutsertakan para Hakim, Pejabat Struktural maupun karyawan untuk mengikuti berbagai macam Diklat dan seminar baik yang dilaksanakan sendiri, Mahkamah Agung maupun oleh instansi lain.
- f. Pengelolaan Aset pada pada wilayah hukum pengadilan Tinggi Bengkulu telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik.
- g. Pengelolaan Keuangan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, akan tetapi masih kurang maksimal dalam hal penyerapan anggaran.
- h. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Bengkulu telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standard Operating Procedure (SOP).

B. REKOMENDASI

1. Agar Pengawasan Internal kepada seluruh Pegawai tetap dilaksanakan bahkan ditingkatkan agar Pengadilan di wilayah Bengkulu dapat terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dapat mencapai visi yaitu menjadi Badan Peradilan yang Agung.
2. Agar dapat meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan harapan dapat semakin memaksimalkan penyerapan anggaran kedepannya.
3. Agar dapat memberikan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Perlu adanya Reward dan Punishment terhadap ketaatan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : W8-U/2967/KP.11.01/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2019 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 yang akurat, lengkap dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)

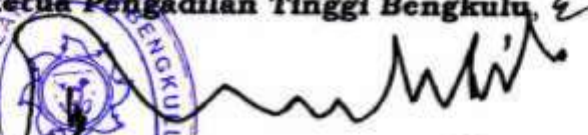
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Penyusun adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun dan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dengan berpedoman pada *outline* dari Mahkamah Agung RI;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 18 Desember 2019

~~di~~ Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, 



MOH. EKA KARTIKA EM

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Nomor : W8-U/2967/KP.11.01/XII/2019
Tanggal : 18 Desember 2019

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

No	NAMA	JABATAN	KEANGGOTAAN
1.	ADI DACHROWI SA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	WINARTO, S.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua
3.	RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	H. TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	ENDRI NOVIAN, S.E.	Sekretaris	Anggota
6.	UMI KALSUM, S.Sos.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7.	YURNI HENDARWATI, S.Pd.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
8.	RIZWAN MANADI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
9.	JAMALUDIN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	TURIJAN, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
11.	ALIDIN, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
12.	M. ALI EL. FAHMI, S.T.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota
13.	RINA ASTUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
14.	LINDA NORA, S.Kom.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
15.	FIDIYAH SISTONA, S.E.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
16.	ENDANG WIJAYA	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
17.	YUDA AGUSTA, S.H., M.H.	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 18 Desember 2019

✓ Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, ✓

MOH. EKA KARTIKA EM